

**ANALISIS KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI
DAERAH
SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**DYAH ELYTA KRISTIANTINA
NIM 0610310065**

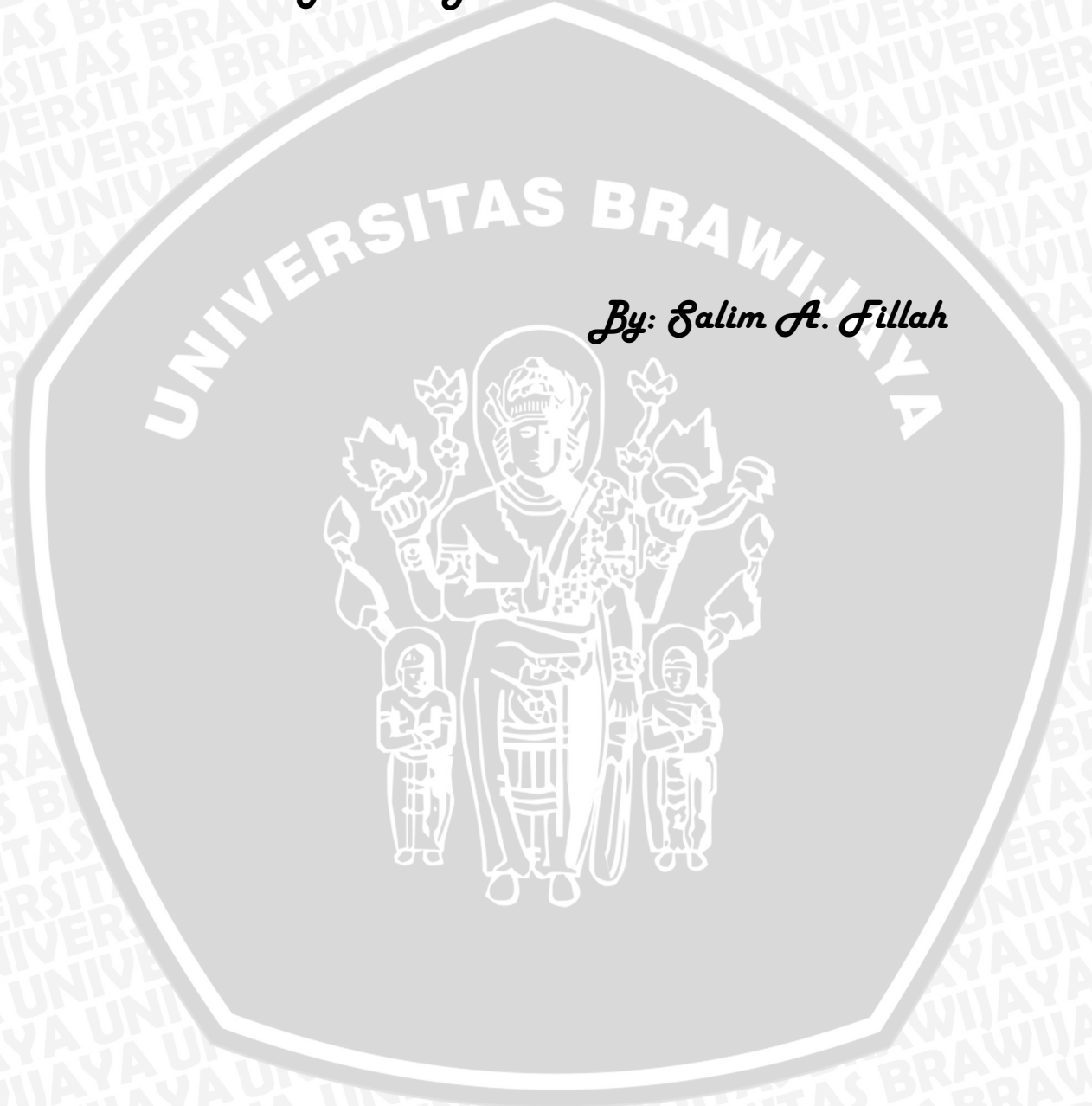


**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
MALANG
2013**

MOTTO

"Jadikan Bidadari Cemburu"

By: Salim A. Fillah



ABSTRAK

Dyah Elyta K.,2013, **Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Blitar dalam Mengembangkan Potensi Daerah Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah**. Dr. Sarwono, M.Si, Dr. Bambang Santoso Haryono, MS, 107 hal + xxii.

Menetapkan kebijakan pengembangan potensi daerah dalam upaya untuk meningkatkan daya saing memerlukan wawasan yang jelas tentang potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Penetapan kebijakan potensi daerah sebagai suatu sektor basis / unggulan juga tidak boleh mengabaikan sektor non basis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor basis di Kota Blitar, dan prioritas potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui advokasi kebijakan guna meningkatkan daya saing daerah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Location Quotient* (LQ) untuk menentukan sektor-sektor basis dan non basis, analisis *Shift Share* (SSA) untuk mengetahui daya saing potensi daerah, dan advokasi kebijakan menggunakan pendekatan teori kebijakan sektoral.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Blitar memiliki sektor basis yaitu sektor jasa dan perdagangan, namun belum memiliki daya saing, dengan potensi sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian. Kebijakan Kota Blitar untuk meningkatkan sektor basis selama ini sudah tepat, namun demikian masih belum diikuti dengan pemetaan investasi daerah pada sektor tersebut. Dalam sistem kebijakan sektoral, advokasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor basis, dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan sektor non basis yang menjadi pendukung, yaitu sektor pariwisata. Pengembangan aktivitas sektor pariwisata dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah objek wisata berbasis wisata tradisional, yang dalam hal ini sejalan dengan tujuan menjadikan Kota Blitar sebagai laboratorium kebangsaan.

Peneliti memberikan advokasi kebijakan “Bulan Wisata” dimana pada bulan tersebut aktivitas-aktivitas kepariwisataan Kota Blitar digelar. Advokasi kebijakan untuk pengembangan sektor pariwisata ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik, yang berdampak pada semakin tingginya aktivitas wisatawan di Kota Blitar. Hal ini tentunya akan berdampak pada kenaikan sektor perdagangan, jasa, hotel, restaurant, industri dan lainnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian secara umum.

Pemerintah Kota Blitar dapat mewujudkan daya saing daerah melalui kebijakan yang inovatif, dengan memperhatikan sektor penggerak perekonomian yang menjadi potensi unggulan, untuk kemudian dapat disusun suatu perencanaan kebijakan guna mengembangkan potensi-potensi unggulan tersebut.

Kata kunci : advokasi kebijakan, daya saing daerah, Location Quotient dan Shift Share Analysis

ABSTRACT

Elyta Dyah K., 2013, **Analysis of Government Policy of Blitar in Developing Region Potential For Improving Regional Competitiveness**. Dr.. Sarwono, M.Si, Dr. Bambang Santoso Haryono, MS, 107 + xxii thing.

Establishing policies of region potential development in order to improve competitiveness requires a clear insight about the potential of the region itself. Establishment of region potential policy as a base sector / major should not ignore the non basis ones. This research aims to find base sectors of Blitar Region, and region potential priority that can be developed through policy advocacy to improve region competitiveness. Analysis tools used in this study are the Location Quotient (LQ) for determining the base and non-base sectors, shift share analysis (SSA) to determine region potential competitiveness, and policy advocacy using theory of sectoral policy approach.

The analysis result shows that Blitar has the base sector namely trade and service sector, but has not had competitiveness, with the potential of tourism sector as a driver of the economy. Blitar policies to improve the base sector have been appropriate, but nevertheless it is still not followed by regional investment mapping in the sector. In the system of sectoral policies, policy advocacy for improving the competitiveness of the services and trade as a base sector can be done by developing non-base sector as the supporting sector, which is tourism sector. Development of the tourism sector activity can be done by increasing the number of tourist attractions based on the traditional, in this case is in line with the intention to build Blitar as national laboratories.

Researchers contribute policy advocacy of "Travel Month" for which in that month the activities of tourism are held in Blitar. Policy advocacy for the development of the tourism sector is expected to increase tourist visits both foreign and domestic, which have an impact on the increasing tourist activity in Blitar. This will certainly have an impact on the increase in the trade, service, hotel, restaurant, and other industries, which in turn will boost the economy in general.

Blitar government can achieve regional competitiveness through innovative policies; take into account in the sectors of economy driver in which to be primary potential, and then be prepared for a planning policy to develop those primary potentials.

Keywords: policy advocacy, regional competitiveness, Location Quotient and Shift Share Analysis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Blitar Dalam Mengembangkan Potensi Daerah Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah” dapat berjalan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana di Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Selain itu, skripsi ini memberikan informasi bagi semua pihak, terutama Jurusan Administrasi Publik tentang kondisi ekonomi Kota Blitar melalui Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB), kontribusi masing-masing sektor dan daya saing masing-masing sektor PDRB.

Penelitian skripsi ini dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar. Selama proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang senantiasa membimbing, memberikan pengarahan dan membantu dalam memberikan saran maupun kritik. Dalam kesempatan yang baik ini, peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada :

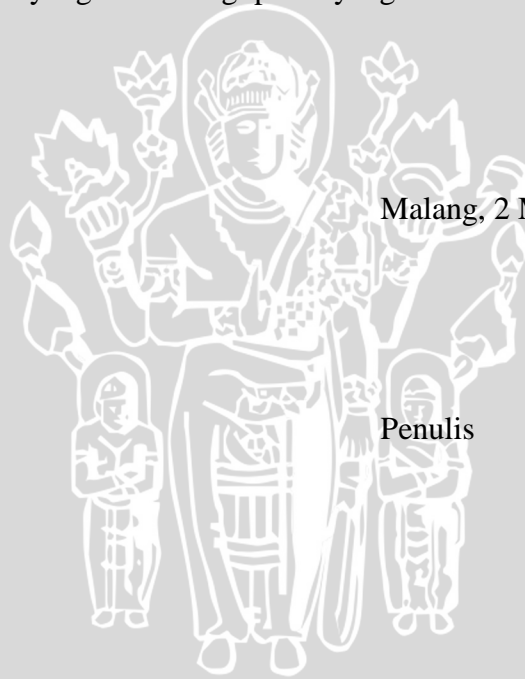
1. Keluargaku, terutama mama atas motivasinya, suami yang selalu sabar mendampingi dan menasihati.
2. Dr. Sarwono, M. Si selaku dosen Pembimbing I peneliti yang telah banyak memberikan masukan dan membimbing peneliti sampai selesainya skripsi ini.

3. Dr. Bambang Santoso H, MS selaku Pembimbing II dan telah memberikan banyak masukan dan kritik untuk perbaikan skripsi ini.
4. Teman-teman yang telah banyak membantu dan memotivasi, terimakasih untuk semangatnya.
5. Semua pihak yang telah membantu peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 2 Mei 2013

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kebijakan Publik.....	13
B. Evaluasi Kebijakan Publik	18
C. Perubahan Kebijakan Publik.....	20
D. Advokasi Kebijakan Publik.....	24
E. Pembangunan Ekonomi Daerah	27
F. Daya Saing Daerah	30
G. Potensi Ekonomi Daerah	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	38
B. Fokus Penelitian.....	39
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian	40
D. Jenis Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Instrumen Penelitian	42
G. Metode Analisis Data	42
H. Keabsahan Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Kota Blitar	49

1. Keadaan Geografis	49
2. Indeks Pembangunan Manusia	51
B. Penyajian Data	53
1. Sektor Perekonomian dalam PDRB.....	53
a. Pertanian	53
b. Pertambangan dan Penggalian	55
c. Industri Pengolahan	56
d. Listrik, Gas dan Air	57
e. Bangunan.....	58
f. Perdagangan, Hotel dan Restoran	59
g. Pengangkutan dan Komunikasi	61
h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.....	63
i. Jasa-Jasa.....	65
2. Pertumbuhan Perekonomian Berdasarkan Sektor	67
3. Pariwisata dan Budaya.....	69
a. Pariwisata	69
b. Sarana dan Prasarana Pariwisata.....	70
c. Budaya Masyarakat.....	71
C. Analisis Data	72
1. Identifikasi Potensi Sektor Perdagangan dan Jasa	72
a. Analisis LQ Tahun 2007.....	73
b. Analisis LQ Tahun 2008	74
c. Analisis LQ Tahun 2009.....	75
d. Analisis LQ Tahun 2010	76
e. Analisis LQ Tahun 2011.....	77
2. Ketepatan Kebijakan.....	79
a. Kebijakan Sektoral.....	79
b. Alokasi Dana Pengembangan Daerah	80
c. Pengembangan Investasi Potensi Daerah	83
3. Advokasi Kebijakan	85
a. Analisis Shift Share	85
b. Kebijakan Pengembangan Pariwisata.....	87
c. Advokasi Kebijakan	92
BAB V PENUTUP.....	105
A. KESIMPULAN	105
B. SARAN.....	106
Daftar Pustaka	xiv
Lampiran	xvi

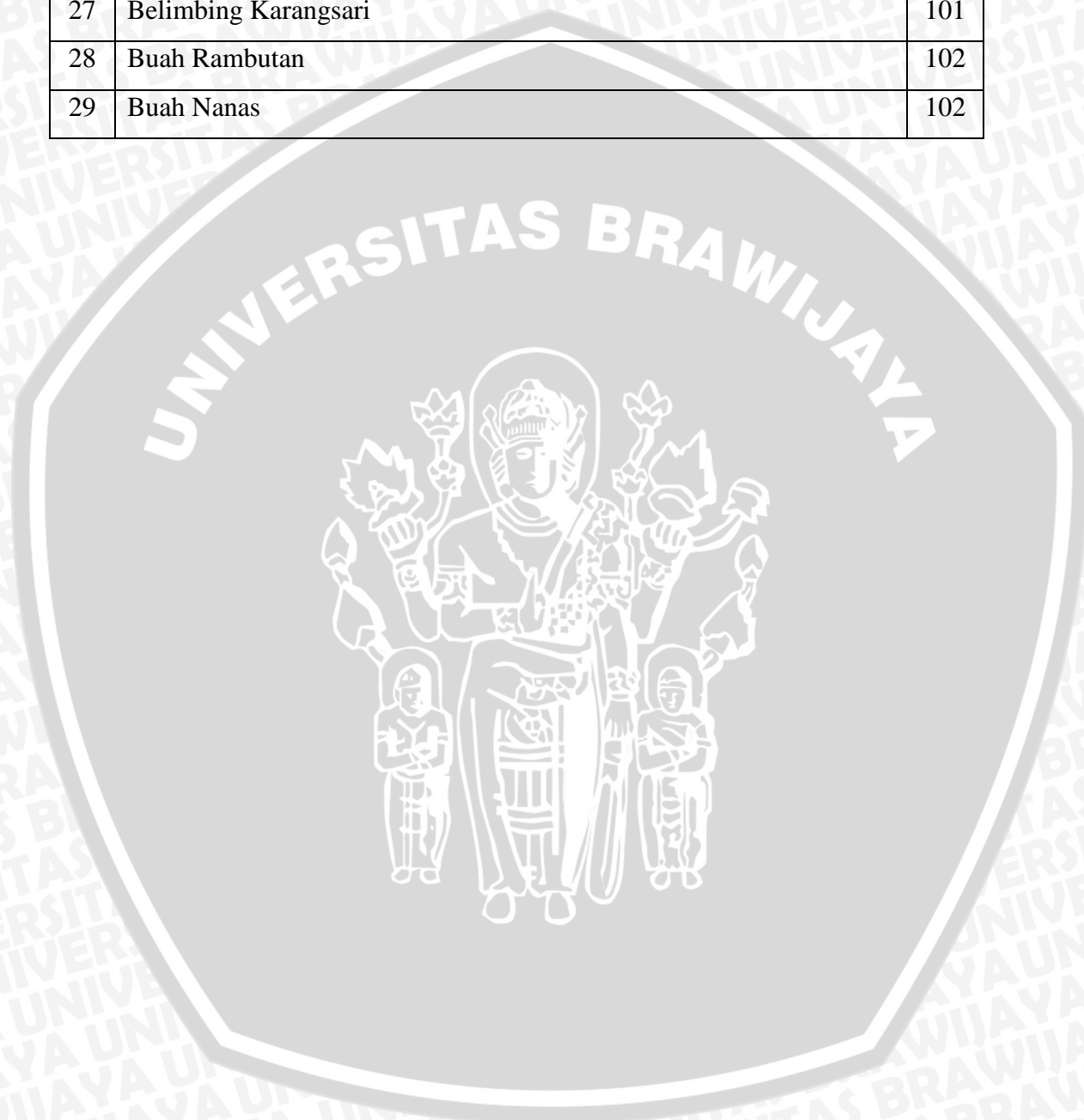
DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1	Perbandingan Kebijakan yang Menyimpang dan Ideal	17
2	Wilayah Kota Blitar	50
3	Komponene IPM Kota Blitar Tahun 2005-2009	52
4	Pertumbuhan Per Sektor perekonomian Kota Blitar	67
5	Analisis LQ Sembilan Sektor PDRB ADHB Kota Blitar Tahun 2007	73
6	Analisis LQ Sembilan Sektor PDRB ADHB Kota Blitar Tahun 2008	74
7	Analisis LQ Sembilan Sektor PDRB ADHB Kota Blitar Tahun 2009	75
8	Analisis LQ Sembilan Sektor PDRB ADHB Kota Blitar Tahun 2010	76
9	Analisis LQ Sembilan Sektor PDRB ADHB Kota Blitar Tahun 2011	77
10	Rata-rata Nilai Indeks LQ Sembilan Sektor PDRB ADHB Kota Blitar Tahun 2007-2009	78
11	Interprestasi Nilai LQ	80
12	Alokasi Dana SKPD Kota Blitar Tahun 2013	81
13	Hasil Analisis SSA Sembilan Sektor PDRB ADHB Kota Blitar Tahun 2007-2011	86

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1	Skema Alur Kebijakan	13
2	Model Kebijakan Hogwood dan Peters	21
3	Grafik IPM Kota Blitar Tahun 2005-2009	52
4	Angka PDRB Sektor Pertanian AHDB Kota Blitar Tahun 2007-2011	53
5	Angka PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian AHDB Kota Blitar Tahun 2007-2011	55
6	Angka PDRB Sektor Industri Pengolahan AHDB Kota Blitar Tahun 2007-2011	56
7	Angka PDRB Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih AHDB Kota Blitar Tahun 2007-2011	57
8	Angka PDRB Sektor Bangunan AHDB Kota Blitar Tahun 2007-2011	58
9	Angka PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran AHDB Kota Blitar Tahun 2007-2011	59
10	Angka PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi AHDB Kota Blitar Tahun 2007-2011	61
11	Angka PDRB Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan AHDB Kota Blitar Tahun 2007-2011	63
12	Angka PDRB Sektor Jasa-Jasa AHDB Kota Blitar Tahun 2007-2011	65
13	Kunjungan Wisatawan ke Kota Blitar	71
14	Kesenian Tari Emprak	93
15	Kesenian Drama Tradisional Ludruk	93
16	Grebeg Pancasila	94
17	Perpustakaan Bung Karno	95
18	Kerajinan Kendang Jimbe	96
19	Kerajinan Batik Jumput Khas Blitar	96
20	Makam Bung Karno	97
21	Ndalem Gebang	97
22	Permainan Tradisional Dakon	98

23	Permainan Tradisional Baksodor	98
24	Makanan Khas Pecel Blitar	100
25	Jajanan Pasar	100
26	Kolak	101
27	Belimbing Karang Sari	101
28	Buah Rambutan	102
29	Buah Nanas	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini setiap negara dituntut untuk lebih berperan aktif dalam ekonomi global. Daya saing nasional dapat dilihat dari seberapa aktif kita dalam pasar global dalam memproduksi barang dan jasa sebagaimana tertulis dalam

"A nation's competitiveness is the degree to which it can, under free and fair market conditions, produce goods and services that meet the test of international markets while simultaneously expanding the real incomes of its citizens. Competitiveness at the national level is based on superior productivity performance and the economy's ability to shift output to high productivity activities which in turn can generate high levels of real wages. Competitiveness is associated with rising living standards, expanding employment opportunities, and the ability of a nation to maintain its international obligations. It is not just a measure of the nation's ability to sell abroad, and to maintain a trade equilibrium." (The Report of the President's Commission on Competitiveness, 1984)

Jika ditelusuri lebih jauh, maka akan kelihatan bahwa masalah utama penurunan daya saing bersumber pada *high cost economy* yang dikeluhkan sejak lama. *High cost economy* yang terjadi selama ini terutama disebabkan birokrasi pemerintah yang lambat dan selalu meminta ongkos yang lebih besar ketimbang pelayanan birokrasi di negeri ini. Dalam hal memulai bisnis misalnya, di Indonesia pengusaha tercatat membutuhkan waktu lebih lama dengan biaya lebih besar. Ada dua faktor menonjol yang membuat pelayanan meminta ongkos besar :

1. Prosedur birokrasinya yang lebih panjang dan dalam prosedur itu melekat korupsi sistemik. Akibatnya birokrasi bukan memberi pelayanan pada pengusaha, melainkan minta dilayani pelaku bisnis. Selain harus

membayar pajak dan distribusi, pengusaha harus merogoh kocek untuk pungli-pungli yang lumayan banyak.

2. Terjadinya government failure (kegagalan pemerintah) dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi lahirnya pasar yang sempurna. (Sumihardjo, 2008 : 3)

Pemerintah memiliki peran aktif dalam mewujudkan daya saing daerah dan pengembangan potensi daerah.

Government is an important player, but many different agencies and 5 administrative units at several levels of geography with differing degrees of autonomy, not just the central government, are involved in decision making and policy action. Companies, academic institutions, and many business associations and other mixed groups organized to facilitate collaborative action (Mudita).

Dengan kekuasaan yang dimiliki, daerah dapat mengelola dan memecahkan masalah pembangunan di daerah, terbukanya peluang usaha untuk menggali potensi daerah dan pengembangan ekonomi daerah untuk membangun daya saing, sehingga secara nasional dan global Indonesia dapat berkiprah dengan kemampuan daya saing yang kokoh dengan negara-negara lain.

Tantangan ini harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah untuk meningkatkan daya saing masing-masing daerah sebagaimana yang tercantum pada UU No. 32 Tahun 2004 pada pasal 1 butir 6 dinyatakan “Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI”. Selanjutnya pada pasal 1 butir 6 yang berhubungan dengan pasal yang mengatur hak dan kewajiban daerah, dan pada salah satu point kewajiban daerah yang diatur dalam pasal 22 adalah “mengembangkan sumber daya produktif di daerah” (Sumihardjo, 2008 : 28)

Melihat pernyataan di atas, tantangan utama dalam pemberdayaan otonomi daerah adalah pemahaman yang akurat dan lengkap mengenai potensi daya saing. Dengan pemahaman yang akurat dan lengkap mengenai potensi daya saing yang dimiliki oleh masing-masing daerah, pemerintah daerah dengan mudah menyusun kebijakan yang benar-benar baik sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha di daerah yang bersangkutan.

Usaha-usaha untuk peningkatan daya saing daerah tersebut juga selaras dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Tribun News dijelaskan bahwa untuk tema pembangunan nasional tahun 2013 yaitu memperkuat potensi perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Ada empat unsur utama dalam tema tersebut, yaitu :

1. Daya saing
2. Daya tahan ekonomi
3. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat
4. Stabilitas sosial politik

Dijelaskan juga dari empat unsur utama tersebut di atas diharapkan mampu bersinergi dengan potensi kedaerahan. Dan peningkatan daya saing merupakan kinerja pemerintah yang berfokus pada peningkatan iklim investasi dan usaha, percepatan infrastruktur atau pembangunan jalur penyambung daerah yang selama ini menjadi persoalan lamanya distribusi, peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan khususnya bagi pekerja muda (m.tribunnews.com).

Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan (pasuruankab.go.id). Potensi daerah dimaksudkan sebagai sumber daya dan kemampuan. Sumber daya meliputi sumber daya nyata seperti tanah, bangunan, tenaga kerja dan sumber daya tidak nyata seperti ketrampilan, keahlian, proses dan moral. (Sumihardjo, 2008 : 12). Dapat disimpulkan bahwa potensi daerah merupakan sumber-sumber alam, sumber daya buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dimanfaatkan sebagai kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Sumihardjo, 2008 : 12)

Potensi daerah setiap daerah di Indonesia tentunya tidak sama, hal ini dikarenakan perbedaan pada faktor sumber daya alam, manusia dan faktor faktor yang lain. Tetapi, setiap daerah pasti memiliki potensi khas yang dengan melalui potensi khas tersebut dapat membentuk daya saing lokal. Dengan adanya otonomi daerah, membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Dalam upaya tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang menekankan pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah untuk mencapai tujuan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui daya saing daerah adalah mengetahui kondisi perekonomian di suatu daerah (Sumihardjo, 2008 : 37) dan pendapatan regional merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan perekonomian suatu wilayah, melalui (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi secara regional maupun sektoral.

The notion of regional competitiveness is as much about qualitative factors and conditions (such as untraded networks of informal knowledge, trust, and the like) as it is about quantifiable attributes and processes (such as inter-firm trading, patenting rates, labour supply and so on). This has major implications for the empirical measurement and analysis of regional competitiveness (Martin, 2-35).

Sektor-sektor ekonomi yaitu sektor-sektor pembentuk angka PDRB yang berperan dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengembangan sektor potensial diartikan sebagai upaya untuk mengubah atau menaikkan keadaan yang ada pada faktor-faktor ekonomi potensial guna peningkatan angka PDRB (umy.ac.id).

Di Indonesia, daerah yang mampu melakukan pengembangan potensi basis dengan maksimal sehingga menyokong pembangunan daerah adalah Provinsi Gorontalo. Dalam buku *Reinventing Local Government* disebutkan bahwa faktor *endowment* daerah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah. Gorontalo dapat berkembang dengan memaksimalkan potensi pertanian terutama jagung dengan sistem agropolitan yang modern. Hal ini dikembangkan karena Gorontalo memang sangat kaya dalam pertanian dan menyumbangkan cukup besar dalam perekonomian kotor di Gorontalo. Menurut Fadel dalam era modern ini pembangunan tidak boleh dilakukan secara parsial tetapi secara

holistik. Infrastruktur pembangunan tidak hanya dilakukan di perkotaan namun juga daerah pedesaan. Tentu ini akan mendukung proses pemaksimalan potensi daerah. (Muhammad, 2008 : 296).

Hasil yang didapatkan dari optimalisasi produk unggulan Gorontalo ini tidak hanya skala lokal di provinsi Gorontalo tetapi juga skala nasional. Sebagai contoh adalah menjadikan Indonesia eksport jagung yang berkualitas. Negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki keinginan untuk mengimport jagung dari Gorontalo, seperti Malaysia. Bahkan produk jagung ini membuka lapangan pekerjaan yang baru, yaitu pabrik pupuk. Selain dalam bidang pertanian, Gorontalo juga memanfaatkan secara optimal sektor perikanan dan kelautan. Dalam pengelolaan sektor ini Gorontalo menggunakan model Manajemen Taksi Mina Bahari. Dalam pelaksanaannya nelayan akan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kebutuhan nelayan seperti kapal, bahan bakar minyak, jaring dan kebutuhan yang lainnya disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (Muhammad, 2008:296)

Pengalaman provinsi Gorontalo memberikan gambaran bahwa pembangunan daerah disesuaikan dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan potensi yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pembangunan di daerah tersebut, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang kesejahteraan di dalamnya termasuk masalah kemiskinan dan pengangguran.

Salah satu indikator yang mampu menggambarkan keberadaan sektor basis adalah melalui indeks LQ (*location quotient*) yaitu suatu indikator sederhana yang dapat menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan daerah di atasnya atau daerah referensi (Daryanto dan Hafizrianda, hal: 20). Dengan diketahuinya sektor unggulan sebagai potensi daerah, maka akan menjadi masukan untuk evaluasi kebijakan yang sudah ada apakah sesuai dengan keadaan potensi daerah sekaligus sebagai perencanaan kebijakan oleh pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sektor unggulan tersebut untuk mewujudkan daerah yang berdaya saing.

Kota Blitar sebagai daerah otonom, di dalam RPJMD 2011-2015 disebutkan memiliki visi “Menuju Masyarakat Kota Blitar Sejahtera yang Berkeadilan, Berwawasan Kebangsaan, dan *Relegius* melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2015” dan dijabarkan pada salah satu misinya yaitu memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan yang mengandung makna bahwa pembangunan perekonomian daerah dilaksanakan dengan mengembangkan potensi ekonomi terutama di bidang pariwisata, perdagangan dan jasa serta harus berpihak kepada masyarakat menengah dan miskin dengan menitikberatkan ke arah perluasan akses ekonomi bagi masyarakat dan pengembangan sektor koperasi, UMKM serta pelaku usaha informal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya mampu menurunkan angka kemiskinan. (bappeda.kotablitar.go.id).

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa potensi yang dikembangkan pemerintah kota Blitar adalah pariwisata, perdagangan dan jasa. Untuk melihat

apakah pemerintah kota Blitar sudah tepat dalam mengambil kebijakan pengembangan potensi ini maka perlu dilakukan analisis LQ terhadap data PDRB kota Blitar sehingga diketahui sektor unggulan apa yang perlu untuk dikembangkan dan didukung dengan kebijakan dari pemerintah untuk mengoptimalkan dan mewujudkan daya saing kota Blitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana gambaran nilai indeks LQ potensi ekonomi sektor perdagangan dan jasa kota Blitar?
2. Bagaimana ketepatan kebijakan pemerintah kota Blitar dalam mengembangkan potensi daerah sebagai upaya peningkatan daya saing daerah?
3. Bagaimana advokasi kebijakan untuk pemerintah kota Blitar dalam mengembangkan potensi daerah sebagai upaya peningkatan daya saing daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis :

1. Nilai indeks LQ potensi ekonomi sektor pariwisata, perdagangan dan jasa kota Blitar.

2. Ketepatan kebijakan pemerintah kota Blitar dalam mengembangkan potensi daerah sebagai upaya peningkatan daya saing daerah.
3. Advokasi kebijakan untuk kota Blitar dalam mengembangkan potensi daerah sebagai upaya peningkatan daya saing daerah.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan nilai (*value*), baik secara akademis maupun praktis terhadap upaya peningkatan daya saing daerah.

Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai antara lain :

1. Akademis

- a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi kebijakan, terutama tentang kebijakan inovatif peningkatan daya saing daerah
- b. Sebagai masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema relevan serta sekaligus sebagai perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan peningkatan daya saing daerah.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta menjadi sarana sosialisasi bagi masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah,

sehingga mampu memahami dan menyikapinya secara tepat untuk bersama-sama pemerintah dalam upaya peningkatan daya saing daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun berdasarkan pokok yang dituangkan secara sistematis terdiri dari lima bab dimana bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan menyangkut masalah potensi ekonomi dalam rangka kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan daya saing daerah di kota Blitar. Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang pertama, latar belakang yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan dengan judul sehingga menarik untuk diteliti. Kedua, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian yang berisikan hal-hal yang hendak dicapai atau ditemukan nantinya. Keempat, kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun praktis sebagai pernyataan hasil bentuk penelitian secara lebih spesifik. Kelima, adalah sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

Bab II : Kajian Teoritis

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, evaluasi kebijakan,

perubahan kebijakan, advokasi kebijakan, pembangunan ekonomi daerah, daya saing daerah, potensi ekonomi daerah.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisi langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian diperelajah yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, instrumen penelitian, metode analisis data dan keabsahan data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan hasil dari penelitian dan menyajikan data umum yang merupakan gambaran objek penelitian yang disusun menurut keperluan penelitian serta penyajian variabel dan pengukurannya untuk kemudian dilakukan analisis, baik melalui perhitungan maupun analisis dengan teori yang digunakan.

Bab V : Penutup

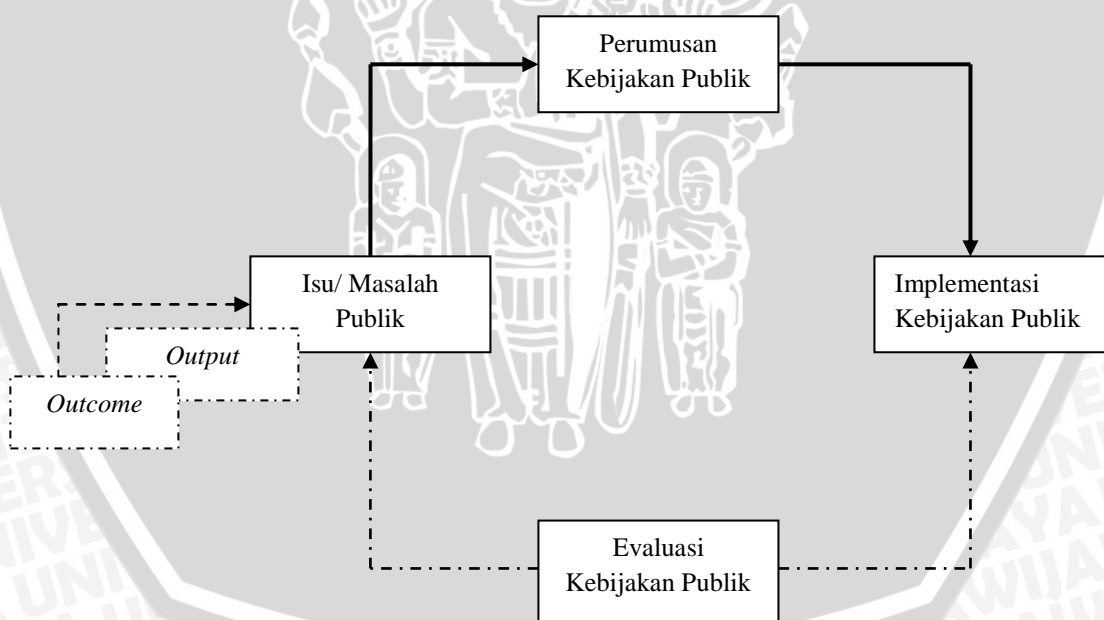
Bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik berdasarkan permasalahan, teori dan analisa data. Sedangkan saran dikemukakan berdasarkan ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan dilapangan. Kemudian saran ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan, kebijakan publik juga dilektakan sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional, dan dapat disimpulkan bahwa :

1. kebijakan publik mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional
2. kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. (Nugroho, 2004, hal. 51-52)



Gambar 1. Skema alur kebijakan publik

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan.
2. isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seuruh negara dan warganya, termasuk pimpinan negara.
3. setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat
4. dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
5. implementasi kebijakan bermuara pada out yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
6. di dalam jangka panjang tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk *impact* kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut. (Nugroho, 2004, h. 73-74)

Dengan melihat skema tersebut di atas, kita melihat bahwa terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan

Kebijakan publik yang ideal adalah yang mengacu pada tantangan yang dihadapi pada masa ini dan di masa depan (Nugroho, 2004 : 263). Menurut Ian Patrick Agustin model seperti ini disebut sebagai sebuah pragmatisme dalam kebijakan publik, dan sebuah pola yang banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang dan maju di kawasan Asia.

Pragmatisme tidak identik dengan oportunisme, tidak sekedar praktisisme. Pragmatisme mengacu kepada keharusan dari setiap ide untuk merujuk kepada konsekuensi implementasinya. Menurut Molan, pragmatisme lebih dekat dengan *goal setting theory*, yakni bahwa setiap tindakan harus mengacu kepada suatu tujuan. Pragmatisme harus bersifat etis dan strategis. Bersifat etis artinya sifat pragmatis ditujukan untuk kepentingan publik dan bukan elit, bukan pula sekelompok atau golongan saja (Nugroho, 2004 : 264)

Pragmatisme startegis mengacu pada tiga ukuran, yaitu :

1. Mengacu pada tujuan.

Tujuannya adalah menjadikan rakyat berdaya. Berdaya artinya memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri (secar individual amaupun kelompok) tanpa terlalu banyak memerlukan uluran tangan pemerintah.

2. Mengacu pada konteks tantangan pada saat ini dan hari depan

Kemerosotan bangsa Indonesia disebabkan masyarakat diberi daya dan kemampuan, tetapi daya dan kemampuan untuk hidup di jaman pra globalisasi. Kebijakan subsidi, proteksi, tidak responsif pasar, kurang mengakomodasi desakan demokrasi, curiga kepada *civil society* dan sejenisnya adalah kebijakan yang tidak kontekstual.

3. Sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Prinsip ini setara dengan prinsip manajemen, yakni optimalisasi *resource* atau sumberdaya. (Nugroho, 2004 : 266).

Kebijakan publik yang ideal adalah kebijakan publik yang membangun keunggulan bersaing dari setiap individu (laki-laki dan perempuan tanpa membedakan) setiap keluarga, setiap organisasi baik masyarakat maupun pemerintah, baik yang mencari laba maupun nirlaba. Tugas negara bukan lagi bersifat rutin, reguler atau tata usaha melainkan membangun keunggulan kompetitif nasional. Output dari kebijakan publik bukan saja sesuatu yang mengatur kehidupan bersama warganya, namun untuk membangun kemampuan organisasi dalam lingkup nasional untuk menjadi organisasi-organisasi yang mampu bersaing dengan kapasitas global (Nugroho, 2004 : 271-272).

Seperti dikemukakan pakar *compositiveness* Mahathir Mohammad dan Michael Potter, bahwa keunggulan kompetitif tidak lain adalah produktivitas, tugas pemerintah adalah menciptakan suasana yang mendukung produktivitas tersebut.

“Governmen, first and foremost, must strive to create an evironment that support rising productivity. This implies a minimalist government role in some areas (e.g trade barries, pricing) and an activist role in others (e.g ensuring vigorous competition, provising high quality education and training)... Government must strive ti improve the business enviroment in may ways. It must not, however, limit competition or to ease standart for safety and

environmental impact. Such 'help' actually retards competitiveness by stunting innovation and slowing productivity improvement” (Nugroho, 2004 : 273).

Di bawah ini tabel kebijakan yang ideal dan menyimpang menurut Nugroho (2004, hal. 274).

Tabel 1. Kebijakan Idel dan Menyimpangan

IDEAL	MENYIMPANG
Menjamin persaingan yang sehat	Pemberian proteksi dan monopoli tanpa batas yang jelas
Kepastian hukum	Bias hukum
Pajak yang proporsional	Pajak daerah yang menghisap kemampuan rakyat
Memberdayakan badan-badan usaha	Menjual badan-badan usaha secara obaral
Pendidikan yang mengacu pada tantangan global	Penyeragaman pendidikan
Membangun kecakapan berdemokrasi	Membuka kran demokrasi tanpa batas yang jelas
Privatisasi dalam bentuk penyebaran kepemilikan BUMN kepada publik domestik secara adil dan merata	Privatisasi BUMN dalam bentuk pemindahan monopoli dari negara ke swasta atau asing
Subsidi yang proporsional atau sesuai dengan target subsidi yang dikehendaki	Subsidi tanpa batas-batas atau penghapusan subsidi secara total atau ekstrem
Kesempatan yang sama bagi investor domestik dan global untuk menguasai aset ekonomi produktif nasional	Memprioritaskan investor global untuk menguasai aset ekonomi produktif nasional
Kebijakan menjamin penerapan prinsip <i>good governance</i> di setiap organisasi	Kebijakan yang memberi hak diskresi kepada kelompok dalam menerapkan <i>good governance</i> .

Arsyad (1999, hal. 108) berpendapat bahwa masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah

tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah dengan mengembangkan basis ekonomi sektoral dan kesempatan kerja yang beragam. Untuk tujuan tersebut diperlukan adanya kebijakan prioritas sektoral dalam menentukan sektor-sektor yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan.

B. Evaluasi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan tidak bisa dilepas begitu saja, kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai (Nugroho, 2004 : 183).

Menurut Winarno evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Oleh karena ketiga komponen tersebut yang menentukan apakah kebijakan akan berhasilguna atau tidak (Nugroho, 2004 : 184).

Globalisasi membuat setiap pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan harus sadar bahwa lingkungan adalah faktor ketiga yang menentukan keberhasilan kebijakan, faktor yang telah berubah dari sekedar variabel pengganggu menjadi

variabel penentu. Karena itu dalam evaluasi kebijakan, perlu kekhususan evaluasi lingkungan kebijakan. Evaluasi ini sendiri, terbagi menjadi dua (Nugroho, 2004 : 203-204) yaitu :

1. Evaluasi lingkungan formulasi kebijakan yang menghasilkan sebuah deskripsi bagaimana lingkungan kebijakan dibuat dan kenapa kebijakan seperti itu.
2. Evaluasi lingkungan implementasi kebijakan berkenaan dengan faktor-faktor lingkungan apa saja yang membuat kebijakan gagal atau berhasil diimplementasikan.

Jadi, pada prinsipnya evaluasi lingkungan kebijakan publik memberikan sebuah deskripsi yang lebih jelas bagaimana konteks kebijakan dirumuskan dan konteks kebijakan diimplementasikan. Sebagian besar dari upaya ini memang jatuh ke sisi deskriptif dengan tujuan membangun sebuah pemahaman bersama untuk membangun *general wisdom* untuk dapat memahami kinerja kebijakan publik.

C. Perubahan Kebijakan Publik

Untuk melihat dimensi perubahan kebijakan harus menggunakan tiga jenis pendekatan :

1. Pendekatan siklus kebijakan
2. Pendekatan organisasional
3. Perubahan kebijakan dan pembelajaran kebijakan (Parson, 2006 : 572)

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan siklus kebijakan.

Menurut Peter dalam proses kebijakan terjadi perubahan yang terus menerus, hal ini mungkin merupakan akibat dari evaluasi kebijakan, tetapi kemungkinan besar merupakan konsekuensi dari perubahan dalam lingkungan kebijakan, politik dan pembelajaran birokratis, atau perkembangan ide dan struktur organisasi (Parson, 2006: 573). Ini berarti bahwa perubahan kebijakan terjadi di dalam ruang kebijakan yang sudah ada, seperti yang ditunjukkan oleh Wildavsky bahwa yang kebijakan sering kali menjadi penyebabnya sendiri, bukan karena dimunculkan oleh masalah baru (Parson, 2006: 573).

Karena itu, kebijakan baru seringkali muncul dari kebijakan yang sudah ada atau tumpang tindih dengan program yang sudah terbentuk. Perubahan kebijakan juga bisa jadi berasal dari kebijakan sebelumnya yang mungkin telah mengubah kondisi, membuat kondisi jauh lebih buruk, atau kebijakan itu tidak memadai. Keterbatasan pertumbuhan ekonomi dan keuangan publik juga akan menentukan arah perubahan kebijakan. (Parson, 2006: 574).

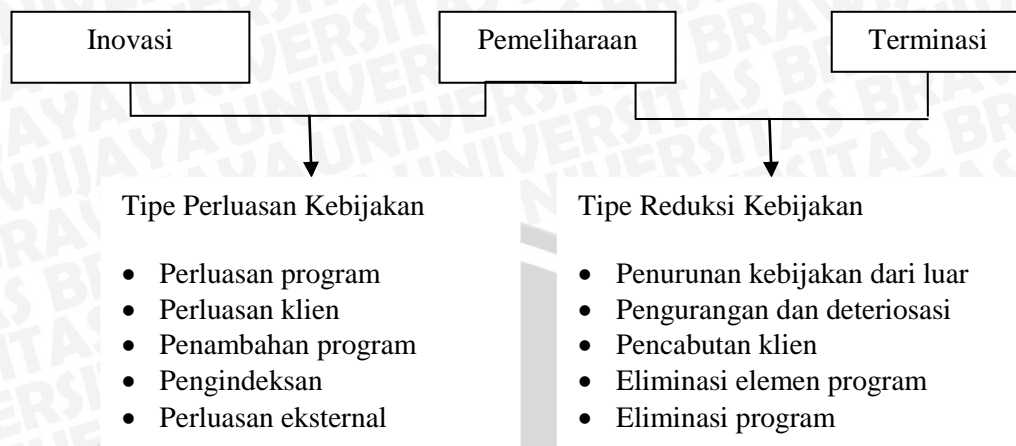
Model perubahan kebijakan menurut Hogwood dan Peters (Parson, 2006: 574) yaitu :

Penggantian kebijakan yang

- Linier
- Konsolidasi
- Splitting
- Nonlinier



Kebijakan Baru



Gambar 2. Model Kebijakan Hogwood dan Peters

- Inovasi kebijakan : ketika pememrintah menjadi terlibat dalam problem atau area yang baru. Dengan adanya fakta bahwa ruang kebijakan modern itu sangat padat, kebijakan baru kemungkinan akan diletakan dalam kerangka yang ada di dalam konteks kebijakan terkait yang sudah ada.
- Suksesi kebijakan : penggantian kebijakan yang sudah ada dengan kebijakan lain. Perubahan ini tidak menimbulkan perubahan fundamental dalam pendekatannya, tetapi melanjutkan kebijakan yang sudah ada.
- Pemeliharaan kebijakan : adalah adaptasi kebijakan-kebijakan, atau penyesuaian untuk menjaga agar kebijakan tetap berada dalam jalurnya.
- Terminasi kebijakan : merupakan sisi lain dari inovasi. Dalam terminasi, sebuah kebijakan atau rprogram akan dihentikan, dikurangi, dan pengeluaran publik pada kebijakan itu akan dipotong. Ini adalah kebijakan mati, sebuah kebijakan yang berhenti mengada.

Inovasi dan terminasi berada pada titik ujung dari kontinum. Kebijakan baru dan terminasi kebijakan jarang terjadi. Kemungkinan besar adalah perubahan

kebijakan akan terjadi di dalam konteks suksesi kebijakan dan dalam domain antara inovasi dan pemeliharaan, pemeliharaan dan terminasi.

Menurut Hogwood dan Peters (Parson, 2006: 574-575) karakteristik suksesi kebijakan dapat dilihat dalam sejauh mana aktor kebijakan, proses kebijakan, dan hasil substantif dari proses suksesi kebijakan dibentuk kebijakan yang sudah ada, yakni kebijakan yang akan digantikan oleh kebijakan baru. Ada empat tipe suksesi, yaitu :

- Linier : penggantian langsung satu kebijakan atau program atau organisasi dengan yang lainnya.
- Konsolidasi : penyusunan ulang sejumlah kebijakan atau program atau organisasi menjadi satu kesatuan yang utuh.
- Pembongkaran sebuah kebijakan atau program atau organisasi menjadi sebuah komponen yang terpisah-pisah.
- Nonlinier : kombinasi kompleks dari tipe-tipe suksesi yang lain.

Suksesi dan inovasi keduanya adalah respon yang melibatkan usaha untuk membuat perubahan secara sengaja. Akan tetapi suksesi adalah usaha pembuat kebijakan untuk mempertahankan kontinuitas dalam cara dan tujuan sebuah kebijakan, dan melakukan inovasi dalam tujuan atau tatanan organisasional untuk mengamankan upaya ini. Jika disimpulkan secara logis, suksesi mungkin mirip dengan tipe inovasi kebijakan. Menurut Hogwood inovasi memerlukan keterlembatan pemerintah dalam aktivitas di area di mana sebelumnya pemerintah tak terlibat. Perubahan ini bersifat purposif, karena pemerintah umunya tidak masuk ke bidang aktivitas baru secara kebetulan. Karena area itu baru, maka tidak

ada organisasi, hukum atau pengeluaran publik sebelumnya. Semua ini harus di susun dari awal (Parson, 2006 : 575).

Inovasi bentuk murni jarang ada. Sebuah kebijakan baru mungkin sesungguhnya contoh reinkarnasi sebuah kebijakan. Di lain pihak, pembuat kebijakan bisa memilih untuk menggunakan inovasi agar kebijakan tersebut dapat diterima. Kemungkinan besar adalah inovasi itu akan melibatkan campuran baru dalam instrumen kebijakan. Peters mengidentifikasi beberapa tipe, yaitu :

1. Hukum atau undang-undang
2. Pelayanan
3. Uang
4. Pajak
5. Instrumen ekonomi
6. Suasi

Inovasi dalam kebijakan mungkin memindahkan tipe suasi seperti dalam kasus pendidikan kesehatan dalam hal merokok ke penggunaan pajak tinggi, ke pengeluaran yang lebih besar dalam layanan kesehatan, ke undang-undang yang melarang merokok di tempat tertentu. Karena itu, menurut Hogwood inovasi bisa dilihat sebagai proses perubahan pada kontinum pemeliharaan kebijakan. Program yang sudah ada bisa diperluas, ditambah cakupannya. (Parson, 2006 : 576).

D. Advokasi Kebijakan Publik

Beberapa definisi advokasi kebijakan menurut beberapa ahli, yaitu :

1. Aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat (Socoro Reyes, *Local Legislative Advocacy Manual, Philippines : The Center for Legislative Development, 1997*).
2. Terdiri atas sejumlah tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat pada suatu isu, dan mengontrol para pengambil kebijakan untuk mencari solusinya. Advokasi juga bersisi aktifitas-aktifitas legal dan politis yang dapat mempengaruhi bentuk dan parktek penerapan hukum. Inisiatif untuk melakukan advokasi perlu diorganisir, digagas secara strategis, didukung informasi, komunikasi, pendekatan, serta mobilisasi (Margareth Schuler, *Human Right Manual*).
3. Aksi kolektif yang terencana untuk mengubah iklim politik yang melibatkan semua pengemban kepentingan, yang diarahkan untuk mengatasi isu-isu dan msalah-masalah spesifik melalui kebijakan publik (Laporan akhir tentang *Central Asian NGOs Adcocacy Training and Study Tour, March 1-12, 1999, The Philippines, The Center for Legislative Development*).
4. Melibatkan berbagai strategi yang ditujukan ntuk mempengaruhi pengambilan keputusan publik yang baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dalam advokasi itu secara khusus untuk memutuskan siap yang memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan, bagaimana cara mengambil keputusan itu dan bagaimana cara menerapkan dan menegakan keputusan (Lisa Vene Klassen dan Valerie Miller, *The Ation Guide for*

Advocacy and Citizen Participation, Washington D.C. : The Asia Foundation, 2002).

5. Aksi yang strategis dan terpadu, oleh perorangan atau kelompok masyarakat untuk memasukan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan, dan mengontrol para pengambil keputusan untuk mengupayakan solusi bagi masalah tersebut sekaligus membangun basis dukungan bagi penegakan dan penerapan kebijakan publik yang dibuat untuk mengatasi masalah tersebut (Manual Advokasi Kebijakan Strategis, IDEA, Juli 2003).

Menurut Lisa dan Miller ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi advokasi yakni : faktor lingkungan, pengembang kepentingan, dan strategi itu sendiri. Tahapan-tahapan berikut dapat dijadikan panduan dalam mengembangkan strategi advokasi, yaitu :

1. Melakukan penilaian pada lingkungan advokasi.

Kampanye advokasi berbeda dari suatu negara ke negara yang lain dikarenakan lingkungan kebijakan masing-masing negara juga berbeda. Sebelum memilih strategi advokasi yang cocok dengan konteks negara, maka organisasi yang melakukan advokasi harus menilai semua aspek kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman yang ada di dalam lingkungannya. Konteks politik dan sosial ekonomi, terutama yang melatar belakangi ketiga pelaku negara, pelaku pasar dan masyarakat sipil sangat menentukan jenis strategi apa yang cocok untuk digunakan. Perlu diingat, strategi yang paling efektif harus dapat memanfaatkan segala kekuatan organisasi dan memanfaatkan semua peluang yang ada.

2. Mengenali para pengemban kepentingan dari isu advokasi.

Dalam mengembangkan strategi advokasi perlu juga mengetahui pihak-pihak mana saja yang terkena dampak masalah yang dihadapi, dan siapa saja yang memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah itu. Tak kalah pentingnya, perlu juga diketahui pihak-pihak yang memiliki sumber daya yang diperlukan, dengan demikian akan tahu siapa yang harus dihubungi dan dimintai bantuan atau dukungan.

3. Memilih strategi yang tepat.

Untuk dapat memilih sebuah strategi atau kombinasi beberapa strategi perlu memahami berbagai alternatif strategi yang dapat digunakan untuk melancarkan advokasi: advokasi media, advokasi legislatif, advokasi melalui lembag eksekutif dan birokrasi, advokasi melalui pengadilan dan membangun koalisi. Pilihan strategi dapat didasarkan pada ketepatannya, efisiensinya serta keefektifannya. Keberhasilan sebuah kampanye advokasi juga tergantung pada pengaturan waktu dan kejelian pihak yang melakukan advokasi dalam menyesuaikan advokasi dengan waktu yang tepat. Yang dimaksud waktu yang tepat adalah peluang politis yang kondusif bagi sebuah advokasi, misalnya: acara pemilihan umum, peristiwa-peristiwa internasional dan rapat-rapat pengambilan keputusan, berbagai tahap perumusan undang-undang atau peristiwa kriminal yang meninggalkan tragedi yang luar biasa.

E. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pendekatan perencanaan dalam pembangunan daerah dapat dilakukan dengan lebih menitikberatkan terhadap pembangunan sektor-sektor atau bidang-bidang tertentu. Di sini tujuan perencanaan dapat diarahkan pada pemecahan masalah pada sektor-sektor yang menjadi *bottleneck* dalam pembangunan, ataupun untuk mengembangkan sektor-sektor yang merupakan leader dalam perekonomian daerah (Hafizrianda dan Daryanto, 2010 : 3).

Pendekatan yang dapat dipakai pula dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah dengan menggabungkan semua kepentingan atas, bawah, sektoral ataupun bidang yang diakomodir dan diselaraskan dalam sebuah perencanaan yang sistematis dan dinamis. Sistem perencanaan ini lebih bersifat simulasi dengan kendala tujuan target makro tetapi pelaksanaannya sesuai dengan tingkat bawah. Hasilnya menjadi perencanaan optimal antar pusat, daerah dan sektor yang dianggap sebagai isu utama nasional atau daerah (Hafizrianda dan Daryanto, 2010 : 4).

Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

1. Segi pembangunan sektoral, pencapaian sasaran pembangunan dilakukan melalui berbagai pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral disesuaikan dengan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
2. Segi pembangunan wilayah, yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah.
3. Segi pemerintahnya, agar tujuan pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pembangunan daerah perlu berfungsi dengan baik karena itu pembangun merupakan usaha-usaha untuk mengembangkan dan

mempererat pemerintah daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab (Tjokrowidjojo, 1996 : 23).

Pelaksanaan pembangunan daerah lebih diarahkan pada peningkatan kemandirian dan kemampuan daerah dalam merencanakan dan mengelola daerah, juga meningkatkan koordinasi pembangunan antar sektor dan antar daerah serta antar pembangunan daerah. Di samping itu, pembangunan daerah diarahkan untuk mendorong berkembangnya ekonomi daerah dengan menitikberatkan pada daerah kota. Yang menjadi tujuan dalam pembangunan daerah adalah :

1. Memanfaatkan potensi yang ada di daerah untuk untuk pengembangan daerah yang bersangkutan
2. Mengusahakan daerah-daerah yang relatif terbelakang dapat berkembang dengan laju yang lebih cepat dari daerah-daerah lainnya sehingga dapat mengurangi terjadinya kesenjangan yang mencolok dalam tingkat kemajuan antar daerah dan pemerataan pendapatan antar golongan masyarakat pada masing-masing daerah
3. Mengusahakan agar peranan daerah-daerah yang relatif terbelakang makin besar dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional (Sipahutar, 2011 : 21).

Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyatno, 2000 : 146). Ada serangkain teori ekonomi sebagai teori yang berusaha menjalankan perubahan regional yang menekankan hubungan antara sektor-sektor yang terdapat dalam perekonomian daerah. Teori

yang paling sederhana dan populer adalah teori basis ekonomi. Menurut Glasson (1990: 63-64), konsep dasar basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu :

1. Sektor-sektor basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.
2. Sektor-sektor bukan basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sektor-sektor tidak mengekspor barang-barang. Ruang lingkup mereka dan daerah pasar terutama adalah bersifat lokal. (Unnes. ac.id)

F. Daya Saing Daerah

Konsep daya saing diekspresikan oleh orang dan lembaga dengan cara yang berbeda, perbedaan tersebut tidak lepas dari pandangan atau konteks yang mereka telaah. Di dalam Hafizrianda dan Daryanto (2010: 11-12) terdapat beberapa telaah mengenai daya saing menurut beberapa ahli, yaitu :

1. Menurut Porter, bahwa konsep daya saing yang dapat diterapkan pada level nasional tak lain adalah produktivitas yang didefinisikan sebagai nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja.
2. Bank Dunia mengatakan hal yang hampir sama, yaitu daya saing mengacu kepada besaran serta laju perubahan nilai tambah per unit input yang dicapai oleh perusahaan.

3. *World Economic Forum (WEF)*, suatu lembaga yang secara rutin menerbitkan “Global Competitiveness Report”, mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional yang mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Komponennya meliputi kebijakan-kebijakan yang tepat, institusi yang sesuai, karakteristik ekonomi yang lain yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan tersebut.
4. *Institute of Management Development (IMD)*, suatu lembaga yang menerbitkan “*World Competitiveness Yearbook*” secara rutin, mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity serta dengan mengintergrasikan hubungan-hubungan tersebut ke dalam suatu model ekonomi dan sosial. Dengan kata lain daya saing nasional adalah suatu konsep yang diharapkan dapat mengidentifikasi peranan negara dalam memberikan iklim yang kondusif kepada perusahaan-perusahaan dalam rangka mempertahankan daya saing domestik dan global.
5. Pada tingkat wilayah di dalam suatu negara konsep daya saing daerah menurut yang didefinisikan oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI), lembaga yang secara rutin menerbitkan “*Regional Competitiveness Indicators in United Kingdom*” adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik dan internasional.

6. *Centre of Urban and Regional Studies (CURDS)*, lembaga yang menerbitkan "*The Competitiveness Project: 1998 Regional Benchmarking Report*", daya saing adalah kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.

Definisi lain menurut Sumiharjdo (2008: 11) pengertian daya saing dapat disusun definisinya sebagai berikut :

1. Daya saing adalah kemampuan untuk meningkatkan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan
2. Daya saing adalah aktivitas mengukur dan membandingkan untuk mengetahui seberapa baik suatu daerah dalam menyediakan iklim tertentu yang kondusif untuk mempertahankan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan
3. Daya saing daerah adalah kemampuan memadukan faktor kondisi lingkungan ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik, sumber daya aparatur, serta masyarakat yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk memperkokoh posisi daerahnya.

Pendefinisian daya saing memperhatikan beberapa hal sebagai berikut

(Hafizrianda dan Daryanto, 2010: 13) :

1. Cakupan daya saing lebih luas dan tidak sebatas produktivitas atau efisiensi saja.
2. Pelaku ekonomi (economic agent) berada dalam suatu sistem ekonomi yang bersinergi.
3. Sasaran peningkatan daya saing suatu perekonomian adalah bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk.
4. Hakikat daya saing adalah kompetisi. Oleh karena itu, daya saing tidak akan pernah ada pada suatu perekonomian yang tertutup.

Perkembangan keunggulan daya saing dapat dikelompokkan ke dalam empat tahap (Hafizrianda dan Daryanto, 2010: 16-17) yaitu :

1. Tahap *factor driven*. Keunggulan daya saing suatu wilayah sebagian besar bersumber dari basic faktor, seperti sumber daya alam melimpah dan tenaga kerja murah.
2. Tahap *Investment-driven*. Keunggulan daya saing muncul karena dipacu oleh investasi yang besar dari perusahaan likal dan transnasional dalam rangka membangun industri berteknologi tinggi, berskala besar, modern dan efisien. Pada tahap ini belum sampai pada tahap *state of the art*.
3. Tahap *innovation driven*. Sumebr keunggulan daya saing suatu wilayah berasal dari tingkat produktivitas tenaga kerja yang terampil dan pemanfaatan teknologi tinggi yang telah mencapai tahap *state of the art*. Pada tahap ini suatu wilayah tidak hanya mampu melakukan improvement terhadap teknologi yang sudah ada, tetapi juga sanggup menciptakan teknologi baru.
4. Tahap *wealth driven*. Merupakan tahap dimana keunggulan daya saing mulai menurun karena tingkat kemakmuran masyarakatnya yang sudah tercapai.

Dalam meningkatkan keunggulan daya saing maka suatu wilayah harus (Hafizrianda dan Daryanto, 2010 : 17) :

1. Mengupayakan meningkatnya menciptakan faktor-faktor produksi
2. Meningkatkan motivasi bekerja, keuntungan serta skala usaha
3. Meningkatkan persaingan domestik
4. Meningkatkan kualitas permintaan
5. Meningkatkan kemampuan menciptakan peluang-peluang usaha baru

Kata kunci pemahaman daya saing berbasis potensi daerah terletak pada kemampuan menjadi unggul suatu daerah didasarkan pada sumber-sumber yang dimilikinya. Kemampuan menjadi unggul merupakan proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi atas sumber-sumber yang dimiliki daerah agar menguntungkan masyarakat daerah. Penciptaan iklim melalui proses yang komprehensif, karena melibatkan semua unsur, berjalan

bertahap, karena kemampuan terbatas, namun pasti, karena direncanakan dengan baik dan terkoordinasi antar, inter dan sektor dan institusi (Sumihardjo, 2008 : 11)

G. Potensi Ekonomi Daerah

Potensi daerah dimaksudkan sebagai sumber daya dan kemampuan. Sumber daya meliputi sumber daya nyata seperti tanah, bangunan, tenaga kerja, dan sumber daya tidak nyata seperti ketrampilan, keahlian proses dan moral. Pendekatan yang umum dalam pengembangan potensi daerah dengan cara menelaah komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), komponen sumber daya manusia, teknologi dan sistem kelembagaan (Sumihardjo, 2008 : 12). Dapat disimpulkan bahwa potensi daerah merupakan sumber-sumber alam, sumber daya buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dapat disebut sebagai kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi daerah pada umumnya meliputi (Sumihardjo, 2008: 12) antara lain:

1. Potensi bidang pertanian, terdiri dari pertanian pangan, hortikultura, perhutanan, perikanan dan peternakan
2. Kelautan, sumber hayati dan non hayati, seperti terumbu karang, ikan hias, pantai pasir putih, wisata kedalaman kelautan (*diving*)
3. Potensi bidang perindustrian dan perdagangan, terdiri dari perindustrian dan perdagangan usaha kecil dan menengah sub bidang jasa, konstruksi, transportasi dan pariwisata

4. Potensi energi dan sumber daya mineral, seperti pembangkit listrik tenaga air skala desa
5. Potensi transmigrasi, lebih kepada potensi kerjasama antar daerah dengan keahlian tertentu untuk kemajuan kedua belah pihak.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pengertian penelitian menurut Hasan (2002, hal.9) adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban, pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya). Arti arti penelitian tersebut terlihat bahwa penelitian memiliki beberapa komponen, yaitu sebagai berikut :

1. Ada rasa ingin tahu dari manusia
2. Ada sesuatu atau masalah
3. Ada proses atau usaha untuk menyelesaikan sesuatu atau masalah tersebut
4. Ada hasilnya, seperti mencapai kebenaran

Berikut ini beberapa arti penelitian dari beberapa oring penulis atau ahli dalam Hasan (2002, hal.9)

1. Menurut kamus *Webster's New International* penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam usaha untuk mencari fakta-fakta dan prinsip-prinsip.
2. Menurut F.L. Whitney penelitian adalah suatu proses yang hasilnya merupakan kebenaran.

3. Menurut T. Hillway penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat mengenai masalah itu.
4. Menurut Parsons penelitian adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.
5. Menurut Mubyarto penelitian adalah penyaluran naluri ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan.
6. Menurut John penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.
7. Menurut Marzuki penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah.
8. Menurut Sugiyono penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
9. Menurut Ibnu Subiyanto penelitian adalah suatu proses pencarian kebenaran atau pembuktian terhadap fenomena (gejala) yang dihadapi melalui prosedur kerja tertentu.
10. Menurut J. Supranto penelitian adalah suatu keinginan untuk memperoleh data atau informasi yang sangat berguna untuk mengetahui sesuatu, memecahkan masalah atau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
11. Menurut Hermawan Wasito penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip cara mengumpulkan dan menganalisis data atau

informasi yang dilaksanakan dengan teliti, jelas dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan.

Metode penelitian (Hasan, 2002: 20) adalah jalan atau cara yang ditempuh sehubungan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif.

Menurut Hasan (2002, hal.22) metode penelitian deskriptif artinya melukiskan variable demi variable, satu demi satu. Metode ini bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.
3. membuat perbandingan atau evaluasi
4. menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Desain penelitian deskriptif menurut Hasan (2002, h. 33) bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu. Dalam menggunakan desain ini, jangan melakukan kesimpulan yang terlalu jauh dari

data yang ada, karena tujuan dari desain ini hanya mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan. Desain ini, kurang memerlukan teorisasi dan hipotesis serta dapat bekerja pada suatu variable.

Menurut Nawawi (2003 : 64) metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh (repository.usu.ac.id).

B. Fokus Penelitian

Tujuan dari penentuan fokus penelitian adalah untuk studi dalam penelitian sehingga objek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas, bisa lebih terarah dan terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penentuan focus penelitian sangat berpengaruh dalam pencapaian hasil penelitian, karena focus penelitian merupakan suatu pedoman bagi pelaksana peneliti. Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Rumusan Masalah Pertama

- a. Nilai indeks LQ potensi ekonomi jasa dan perdagangan yang dikembangkan kota Blitar sebagai upaya peningkatan daya saing daerah
2. Rumusan Masalah Kedua
 - a. Ketepatan Kebijakan Sektoral
 - b. Ketepatan Alokasi Dana Pengembangan Potensi Daerah
 - c. Ketepatan Pemetaan Investasi
3. Rumusan Masalah Ketiga
 - a. Nilai Indeks Analisis Shift Share potensi ekonomi jasa dan perdagangan
 - b. Kebijakan Pengembangan Pariwisata
 - c. Advokasi Kebijakan

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Pemilihan lokasi ditujukan untuk menentukan tempat diadakannya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang tepat, akurat, dan benar – benar dibutuhkan oleh peneliti dalam menjalankan penelitiannya. Peneliti juga diharapkan menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti termasuk ciri – ciri lokasi, lingkungannya serta segala kegiatan yang ada di dalamnya. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kota Blitar, Provinsi Jawa timur. Sedangkan situs penelitian ini adalah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Pusat Statistik Kota Blitar

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan hal penting dalam penentuan pengumpulan data, dan sumber data merupakan sumber dari mana data tersebut diperoleh peneliti dalam proses penelitiannya.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti sebagai bahan analisis berdasarkan sumber pengambilannya (Hasan, 2002, h. 82) yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia. Sedangkan sumber data yang diambil peneliti sebagai bahan analisis adalah dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumenter, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis yang terdiri dari data pribadi dan data resmi. Dalam hal ini peneliti meneliti dokumen-dokumen yang termasuk di dalamnya Produk Domestik Regional Bruto kota Blitar dan Jawa Timur, data pemetaan investasi daerah, data alokasi dana SKPD Kota Blitar.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi dalam Hasan (2002. h. 76) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah. Adapun yang menjadi instrument dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti itu sendiri, dimana peneliti dapat menangkap fenomena-fenomena yang terjadi mengenai apa yang diteliti.
2. Alat-alat tulis untuk membantu dalam pencatatan hal-hal yang penting di lapangan.

G. Metode Analisis Data

Menurut Bogna dan Biklen (Moleong, 2007: 248), analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Terdapat tiga rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti, dan masing-masing rumusan masalah memiliki teknik analisis data seperti di bawah ini.

1. Rumusan masalah pertama

Untuk menjawab rumusan masalah pertama peneliti menggunakan alat analisis :

- *Location Quotient Analysis (LQ Analysis)*

Salah satu sasaran pembangunan terutama perekonomian suatu daerah adalah terjadinya pergeseran struktur ekonomi satu wilayah karena pembangunan yang dilakukan oleh wilayah tersebut. Tidak semua sektor

dalam perekonomian memiliki kemampuan tumbuh yang sama dalam hal ini pemerintah akan dapat mengevaluasi dan membuat kebijakan sesuai dengan identifikasi sifat potensi-potensi, basis maupun tidak basis (Daryanto dan Hafizrianda, 2010 : 20).

Rumus perhitungan LQ :

$$LQ (\text{sektor } i) = \frac{X_{ir} / X_r}{X_{in} / X_n}$$

X = nilai

i = sektor

r = regional

n = nasional atau daerah diatas r

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut :

- a. Jika LQ lebih besar dari satu ($LQ > 1$), merupakan sektor basis dan berpotensi untuk ekspor, artinya spesialisasi kota/kabupaten lebih tinggi dari tingkat propinsi.
- b. Jika LQ lebih kecil dari satu ($LQ < 1$), merupakan sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat propinsi.
- c. Jika LQ sama dengan satu ($LQ = 1$), berarti tingkat spesialisasi di kabupaten sama dengan tingkat propinsi

- *Shift Share Analysis (SSA)*

Lahirnya konsep *shift share analysis* dalam analisis ekonomi wilayah dimaksudkan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan dari perhitungan indeks konsentrasi seperti LQ. Dalam analisis LQ tidak dijelaskan faktor penyebab terjadinya perubahan struktur ekonomi, sedangkan dengan analisis *shift share* perubahan struktur ekonomi wilayah dijabarkan berdasarkan faktor-faktor penyebabnya (Daryanto dan Hafizrianda, 2010 : 25).

Analisis ini digunakan untuk menentukan kinerja atau produktivitas suatu daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sektor-sektor ekonomi potensial suatu daerah kemudian membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional/ nasional). Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam tiga bidang yang berhubungan satu sama lain (Arsyad 1999 : 314). Tiga bidang tersebut yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pekerjaan agregat secara sektoral kemudian dibuat perbandingan dengan sektor perekonomian yang sama sebagai acuan, sehingga diketahui perubahan-perubahan dan perbandingannya.
2. Pergeseran proporsional digunakan untuk mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat daripada perekonomian yang dijadikan acuan.

3. Pergeseran diferensial digunakan untuk membantu dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi tingkat daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan.

Menurut Daryanto dan Hafizrianda (2010 : 5) dikemukakan bahwa :

Pada prinsipnya SSA itu berusaha untuk memecah atau mendekomposisi besaran deviasi (selisih) antara nilai tambah (menggunakan pendekatan nilai tambah) pada tahun ke-t dengan nilai tambah pada tahun dasar, dan biasanya dinotasikan dengan ΔY^i . Terdapat tiga variabel dekomposisi yang menjadi komponen dari deviasi ΔY^i , yaitu komponen pertumbuhan regional (PR), komponen pertumbuhan proporsional (PP) dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW).

Jika dituangkan dalam bentuk persamaan matematis menjadi :

$$\Delta Y^i = PR + PP + PPW$$

$$Y'^i - Y^i = Y^i (R_a - 1) + Y^i (R^i - R_a) + Y^i (r^i - R^i)$$

Dimana :

ΔY = perubahan dalam pendapatan subsektor

Y^i = PDRB subsektor pada tahun dasar provinsi

Y'^i = PDRB subsektor pada tahun akhir analisis provinsi

$R_a = Y' / Y$

$R^i = Y'^i / Y^i$

$r^i = Y'^i / Y^i$

Y = PDRB seluruh subsektor pada tahun dasar analisis provinsi

Y' = PDRB seluruh subsektor pada tahun akhir analisis provinsi

Y^i = PDRB subsektor pada tahun dasar analisis wilayah yang diteliti

Y'^i = PDRB subsektor pada tahun akhir analisis wilayah yang diteliti

Setelah melakukan analisis data tersebut maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

2. Rumusan masalah kedua

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua peneliti mengambil kesimpulan dari rumusan masalah pertama, membandingkan dengan data alokasi dana pengembangan daerah, pemetaan investasi daerah dan menganalisisnya dengan teori kebijakan sektoral.

3. Rumusan masalah ketiga

Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga peneliti menyajikan hasil analisis *Shift Share* untuk melihat daya saing, kemudian mencoba memberikan solusi kebijakan dengan menggunakan analisis data berdasarkan, inovasi kebijakan, advokasi kebijakan dan perubahan kebijakan. Selanjutnya akan dapat disimpulkan sebuah saran kebijakan yang dinilai tepat untuk pemerintah kota Blitar dalam mengembangkan potensi daerah sebagai upaya peningkatan daya saing daerah.

H. Keabsahan Data

Hasil penelitian merupakan bagian terpenting dalam sebuah proses penelitian. Baik atau tidaknya hasil penelitian sangat tergantung dari proses yang dijalani oleh peneliti selama melakukan penyusunan penelitian. Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya, maka diperlukan

pengecekan keabsahan temuan atau keabsahan data. Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standart yang digunakan, yang disebut dengan keabsahan data. Ada empat kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, hal ini dikemukakan oleh Moleong (2002: 173), yaitu :

1. Memperpanjang keikutsertaan di lapangan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Idealnya, semakin lama waktu yang digunakan peneliti di lapangan untuk mengumpulkan data, semakin lebih bagus. Perpanjangan keikutsertaan di sini juga berfungsi sebagai sarana untuk mendalami fakta di lapangan untuk mempertajam analisa.

2. Melakukan *peer debriefing*

Teknik *peer debriefing* dilakukan untuk mempertajam analisa dengan cara meminta masukan dan berdiskusi dengan rekan sejawat tentang masalah yang sedang diteliti ataupun dengan orang-orang yang mempunyai perhatian khusus dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Triangulasi biasanya gabungan antara wawancara, dokumentasi dan observasi untuk saling menguatkan fakta yang ada di lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Blitar

1. Keadaan Geografis

Secara geografis posisi wilayah Kota Blitar berada pada sisi selatan Provinsi Jawa Timur, yang terletak pada koordinat $112^{\circ} 14'$ - $112^{\circ} 28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 2'$ - $8^{\circ} 10'$ Lintang Selatan. Antara pusat pemerintahan kota dengan pusat pemerintahan provinsi yang beribukota di Surabaya berjarak ± 160 km, dengan temperatur udara rata-rata berkisar pada 29° C dan tipe iklim C-3.

Kontur tanah wilayah kota Blitar termasuk daerah yang memiliki tingkat kemiringan cukup tinggi sebagai pengaruh dari posisinya yang berada pada lereng Gunung Kelud. Dari posisi tersebut ketinggian tanah di kota Blitar terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian utara, tengah dan selatan dimana bagian utara mempunyai ketinggian ± 245 meter dari permukaan laut, bagian tengah ± 190 meter dari permukaan laut dan bagian selatan ± 140 meter dari permukaan laut, sehingga secara keseluruhan tingkat ketinggian rata-rata adalah 157 meter dari permukaan laut.

Struktur tanah di wilayah kota Blitar terdiri dari jenis tanah Litosol dan Regosol hal tersebut diakibatkan karena sisa material letusan dari Gunung Kelud. Sungai yang mengalir di kota Blitar adalah sungai lahar dengan panjang $\pm 7,84$ km yang hulunya berada di gunung Kelud dan bermuara di sungai Brantas. Posisi yang tidak jauh dari gunung Kelud tersebut berpengaruh pada curah hujan dan hari hujan.

Wilayah kota Blitar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar, terdiri atas tiga kecamatan dengan 20 kelurahan. Selanjutnya pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2005 dijadikan 21 kelurahan hasil dari pemecahan kelurahan Pakunden yang menjadi kelurahan Pakunden dan Tanjungsari. Adapun perincian luas wilayah masing-masing kelurahan dan kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Wilayah Kota Blitar

Kecamatan		Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)
1.	Sukerojo		9,9246
		1. Tlumpu 2. Karang Sari 3. Turi 4. Blitar 5. Sukerejo 6. Pakunden 7. Tanjungsari	1,0153 0,8824 0,5086 1,33205 1,4662 2,262 2,45805
2.	Kepanjenkidul		10,50234
		1. Kepanjenkidul 2. Kepanjenlor 3. Kauman 4. Bendo 5. Tanggung 6. Sentul 7. Ngadirejo	0,86703 0,61328 0,68033 1,5185 2,23 2,683 1,9102
3.	Sananwetan		12,15155
		1. Rembang 2. Klampok 3. Plosokerep 4. Karangtengah 5. Sananwetan 6. Bendogerit 7. Gedog	0,84425 1,5307 1,2481 1,7954 1,1279 1,9552 2,65
Kota Blitar			32, 57849

Sedang secara administratif, wilayah kota Blitar dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum
- Sebelah selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro
- Sebelah barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok
- Sebelah timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum

2. Indeks Pembangunan Manusia

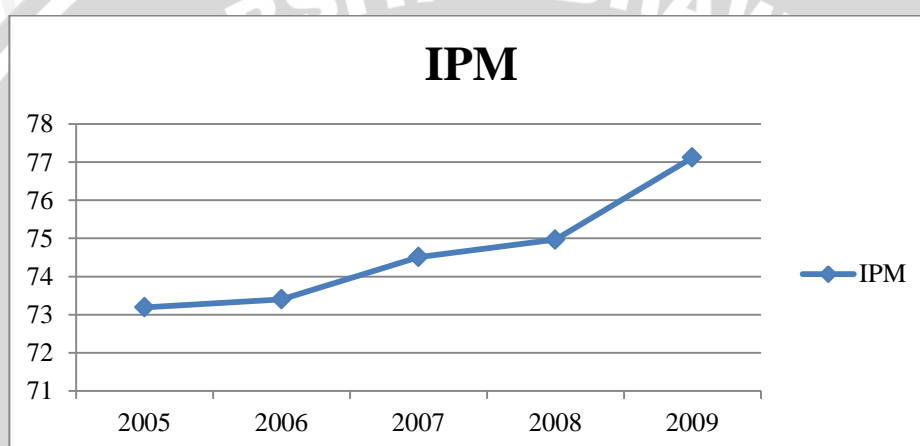
Salah satu indikator yang dipakai dalam pengukuran keberhasilan pembangunan adalah angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang tersusun berdasarkan tiga indikator yaitu indeks kesehatan yang diukur dengan indeks harapan hidup pada saat lahir; indeks pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk usia 15 tahun ke atas dengan bobot dua per tiga dan rata lama sekolah dengan bobot sepertiga; dan indeks *purchasing power parity* (PPP) yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan. Indikator pertama mengukur indikator umur panjang dan sehat, indikator kedua mengukur pengetahuan dan ketrampilan, sedangkan indikator terakhir mengukur kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas yaitu daya beli.

Pembangunan manusia yang berhasil akan membuat usia rata-rata masyarakatnya meningkat dan terjadi peningkatan pengetahuan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas SDM. Pencapaian dua hal tersebut selanjutnya akan meningkatkan produktivitas, sehingga dapat meningkatkan

kehidupan yang layak. Dalam kurun waktu 2005 sampai dengan tahun 2009 tingkat pencapaian IPM kota Blitar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. Komponen IPM Kota Blitar Tahun 2005-2009

Komponen IPM	2005	2006	2007	2008	2009
Indeks Kesehatan	76.67	77.08	77.53	78.50	77.85
Indeks Pendidikan	84.76	84.73	85.26	86.59	86.63
Indeks PPP	58.13	58.37	60.75	59.82	66.88
IPM	73.19	73.40	74.51	74.97	77.12



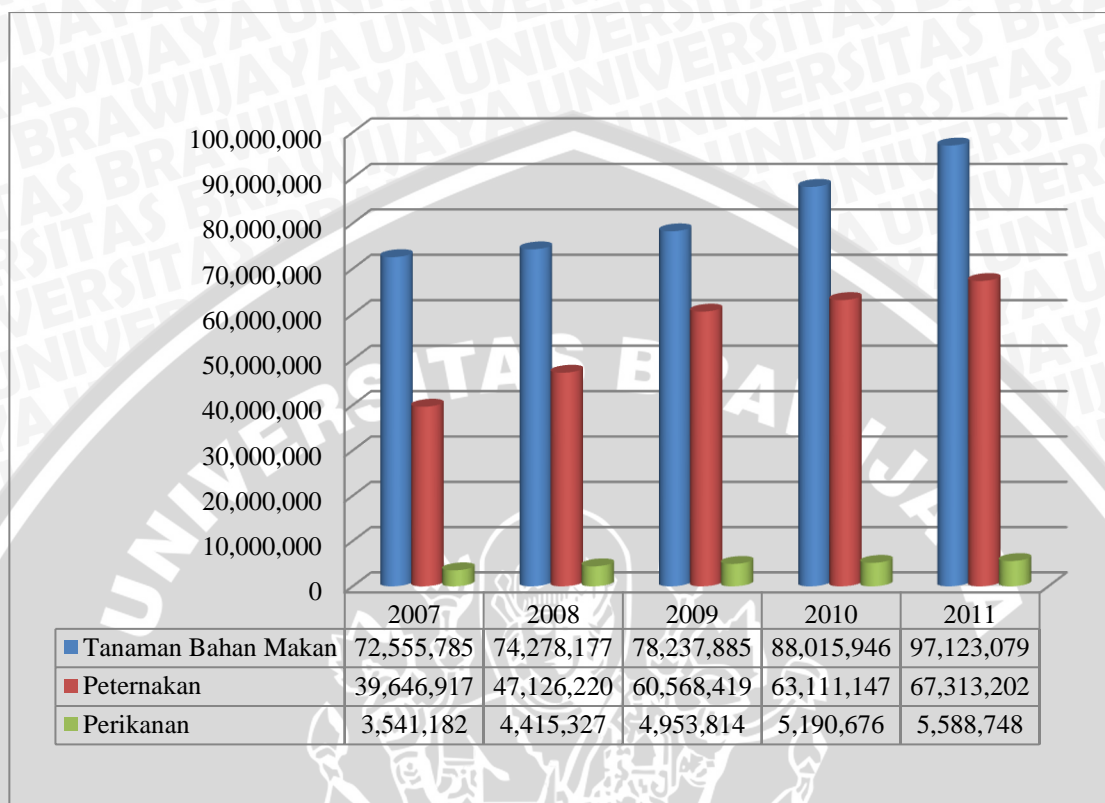
Gambar 3. Grafik IPM Kota Blitar Tahun 2005-2009

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat secara keseluruhan setiap tahun nilai IPM mengalami peningkatan, walaupun terdapat point penurunan pada indeks kesehatan pada tahun 2009 dan indeks daya beli pada tahun 2008 namun meningkat lagi pada tahun selanjutnya.

B. Penyajian Data

1. Sektor Perekonomian dalam PDRB

a. Pertanian



Gambar 4. Angka PDRB Sektor Pertanian Kota Blitar Tahun 2007-2011

Sektor pertanian ini merupakan segala pengusaha yang di dapat dari alam dan merupakan barang-barang biologis atau hidup dimana hasilnya akan digunakan memenuhi hidup sendiri atau dijual kepada pihak lain, tidak termasuk kegiatan yang tujuan untuk hobi saja. Kegiatan pertanian pada umumnya berupa cocok tanam, pemeliharaan ternak, penangkapan ikan, penebangan kayu dan pengambilan hasil hutan serta perburuan binatang liar. Sektor pertanian meliputi sub sektor yang terbagi seperti di bawah ini.

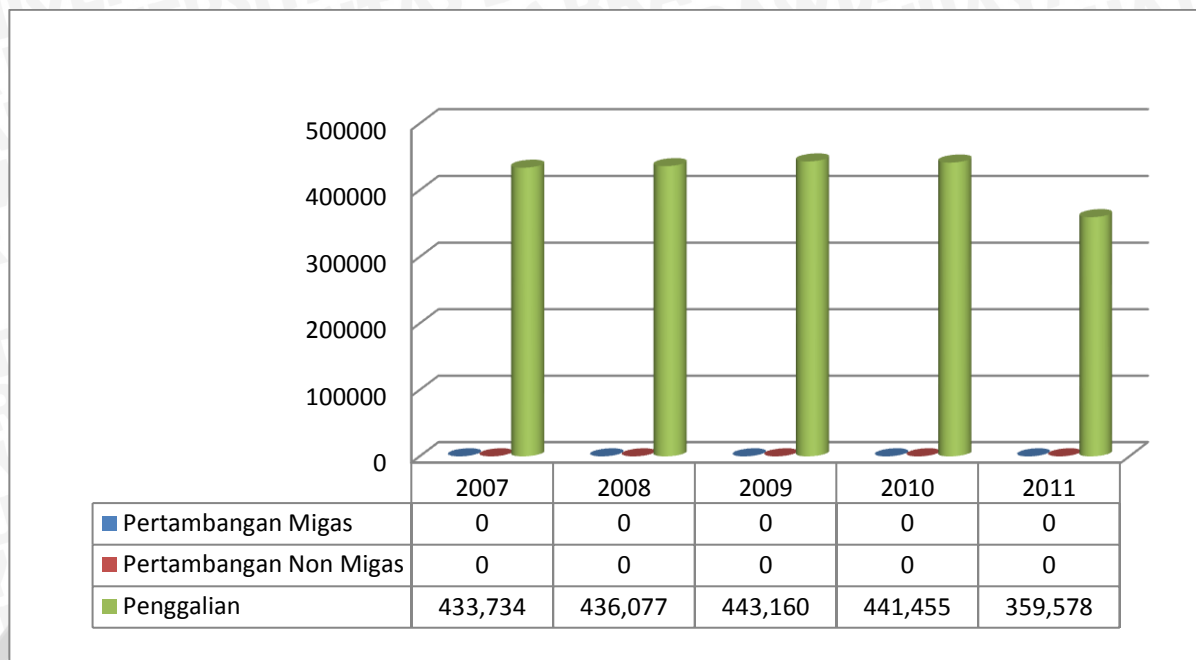
- 1. Tanaman Bahan Makanan.** Subsektor ini meliputi komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan, dan

sejenisnya serta hasil-hasil produk ikutannya. Data produksi diperoleh dari Dinas Pertanian Daerah Kota Blitar, sedangkan data harga dari BPS kota Blitar.

2. Peternakan. Sub sektor ini mencakup kegiatan pemeliharaan segala jenis ternak dan unggas seperti babi, kerbau, kambing, domba, kuda, babi, itik, ayam petelur dan sejenisnya dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong dan diambil hasil-hasilnya baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan peternakan maupun hasil ternak yang meliputi susu segar dan telur. Data produksi diperoleh dari Bidang Peternakan Dinas Pertanian Daerah Kota Blitar, sedangkan data harga dari BPS Kota Blitar.

3. Perikanan. Sub sektor ini meliputi kegiatan penangkapan dan pemeliharaan segala jenis ikan dan binatang air (kerang, siput dan udang) baik di air tawar maupun di air asin seperti perikanan umum, tambak, kolam dan keramba baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Data produksi diperoleh dari Seksi Perikanan Dinas Pertanian Kota Blitar, sedangkan data harga dari BPS Kota Blitar.

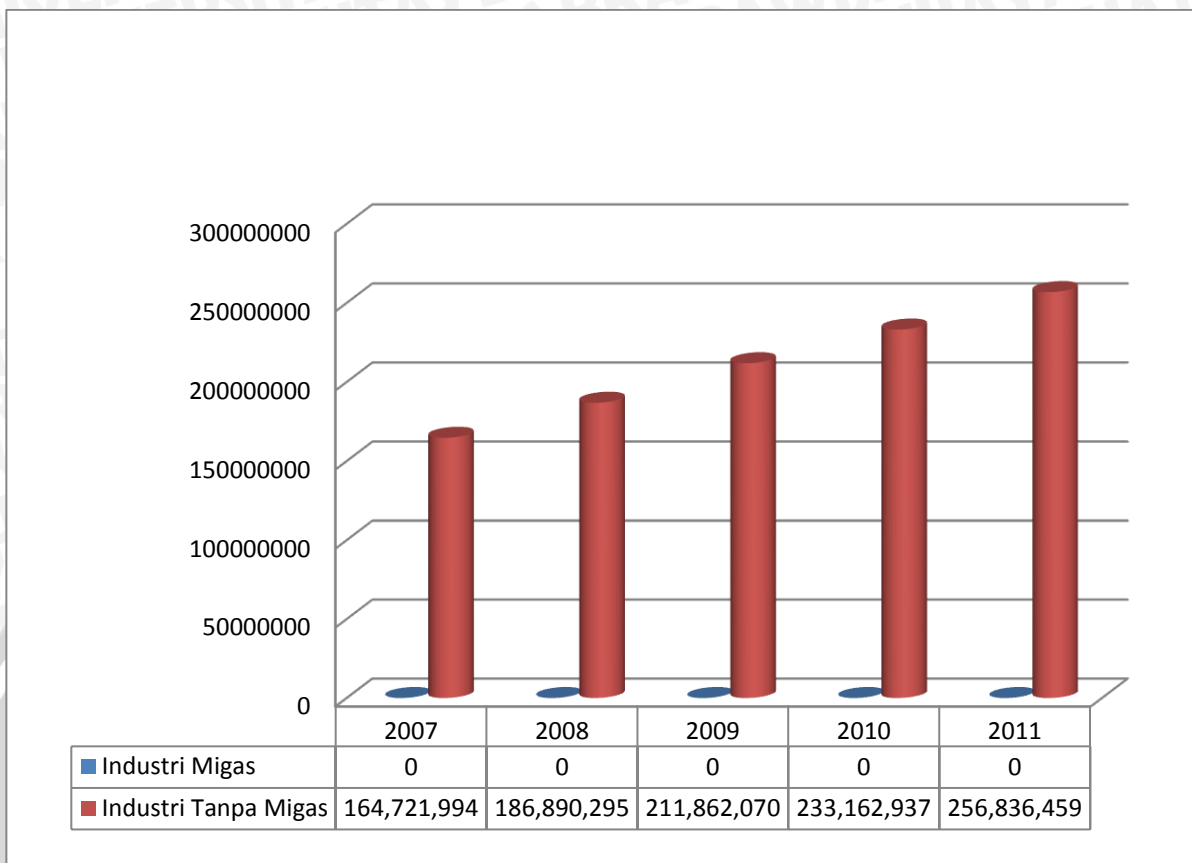
b. Pertambangan dan Penggalian



Gambar 5. Angka PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian Kota Blitar Tahun 2007-2011

Sektor usaha ini mencakup usaha kegiatan penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi dan biasa disebut golongan C. Hasil-hasil kegiatan ini antara lain adalah pasir bangunan, batu kerikil, tanah liat dan sejenisnya. Data harga dan produksi diperoleh dari hasil survei yang dilakukan BPS Kota Blitar berupa data primer dan sekunder.

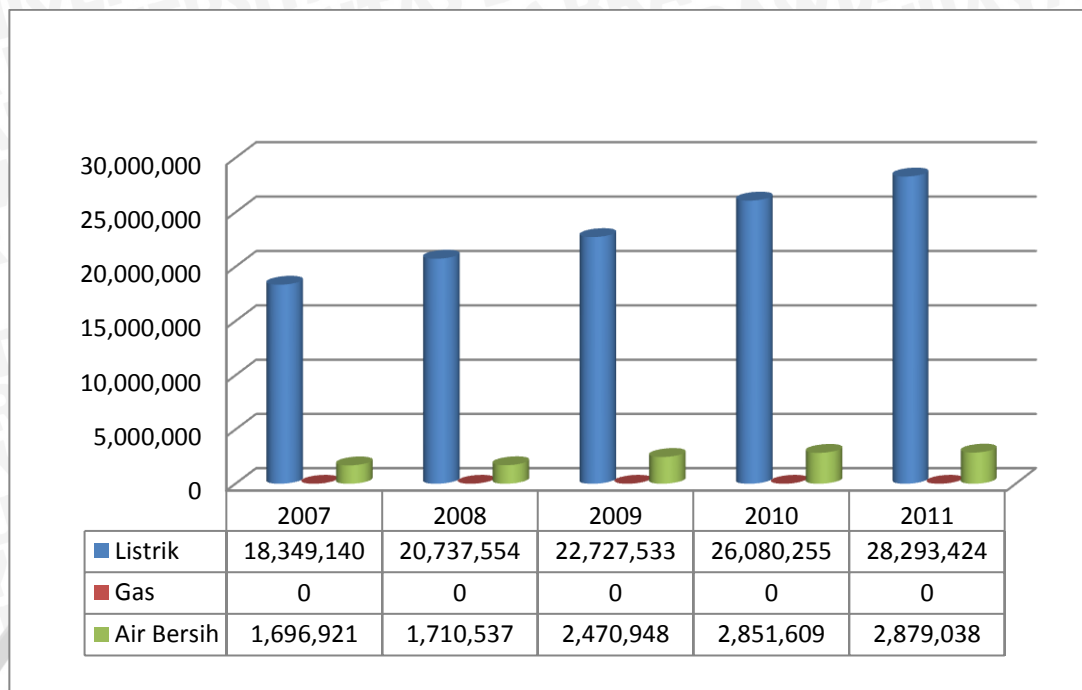
c. Industri Pengolahan.



Gambar 6. Angka PDRB Sektor Industri Pengolahan Kota Blitar Tahun 2007-2011

Sektor usaha ini terdiri dari industri besar/ sedang dan kecil yang termasuk di dalamnya rumah potong hewan dan kerajinan rumah tangga. Data produksi diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, sedangkan data harga dari BPS Kota Blitar.

d. Listrik, Gas, dan Air Bersih



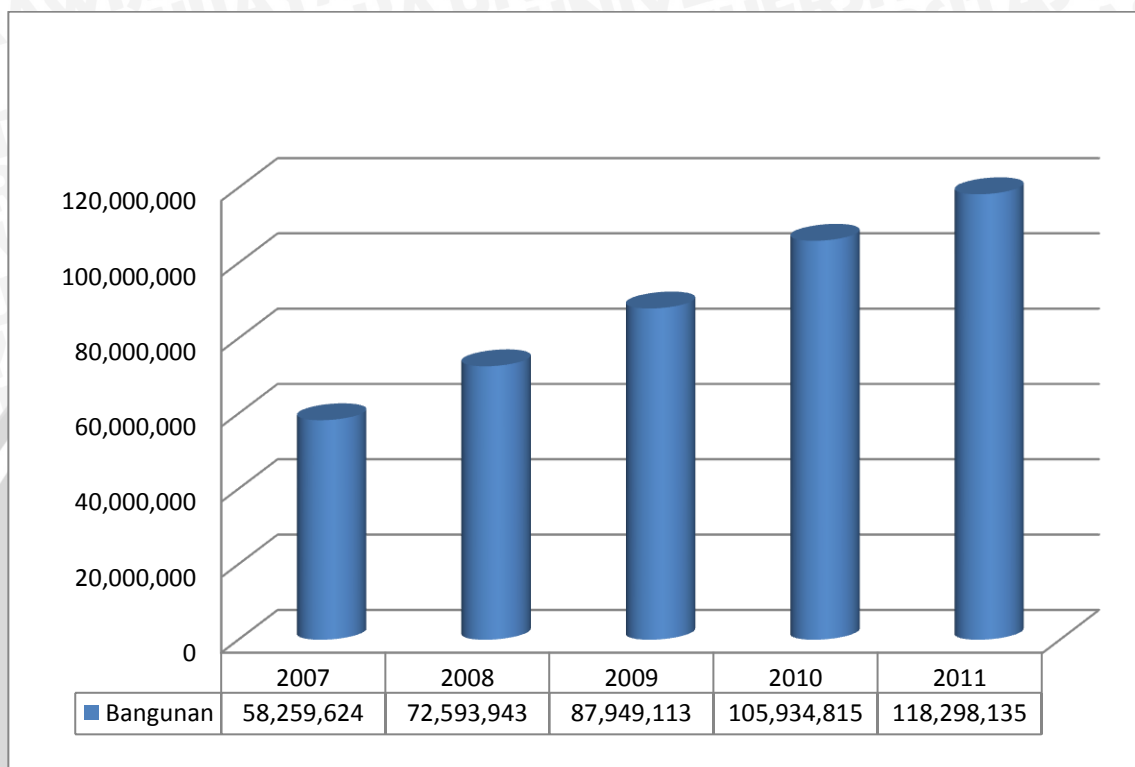
Gambar 7. Angka PDRB Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih Kota Blitar Tahun 2007-2011

Sektor ini meliputi subsektor listrik, gas dan air bersih. Se jauh ini kegiatan pada subsektor gas di Kota Blitar belum ada sehingga yang di bahas pada sektor ini hanya sub sektor listrik dan air bersih.

- 1. Listrik.** Subsektor usaha ini mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diusahakan oleh PLN maupun non PLN dengan tujuan untuk di jual. Listrik yang dibangkitkan meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri dan hilang dalam transmisi dan listrik yang dicuri. Data produksi dan harga diperoleh dari PLN Ranting Blitar.
- 2. Air Bersih.** Subsektor usaha ini mencakup air bersih yang diusahakan oleh PDAM (Perusahaan Air Minum Daerah), yang meliputi proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum serta pendistribusian dan penyalurannya melalui pipa dan alat lain ke rumah tangga, instansi pemerintah

maupun swasta. Data produksi dan harga diperoleh dari PDAM Kota Blitar.

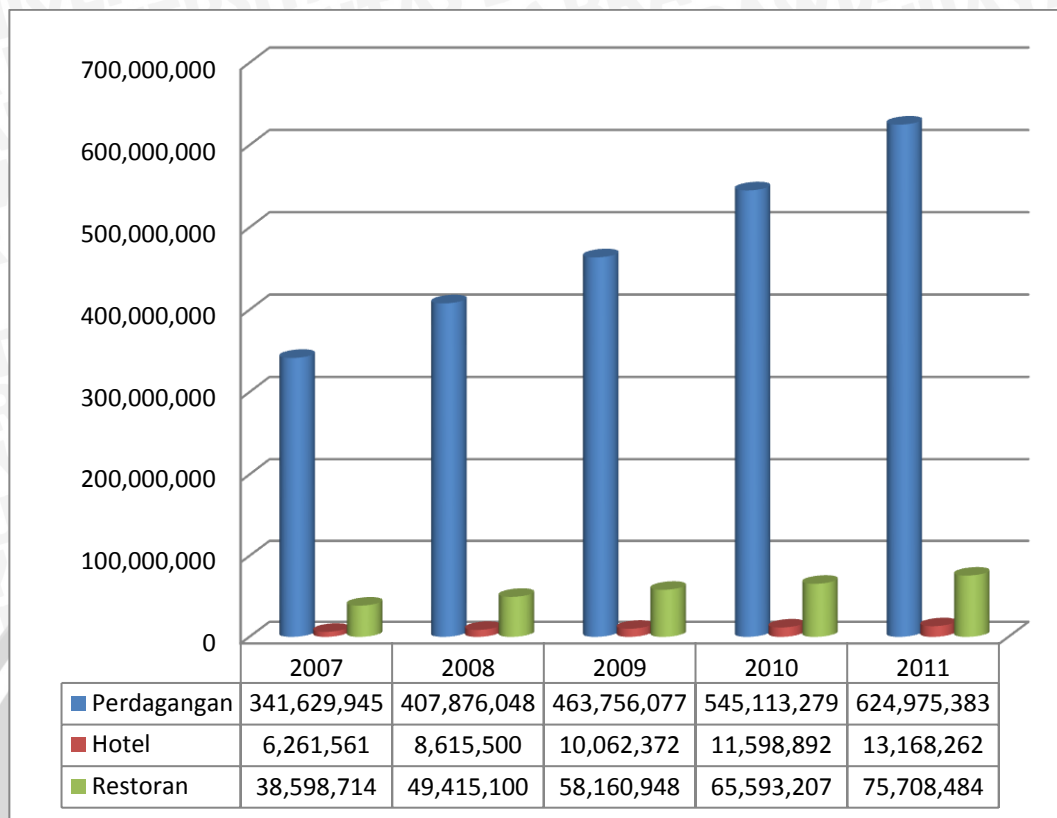
e. Bangunan



Gambar 8. Angka PDRB Sektor Bangunan Kota Blitar Tahun 2007-2011

Sektor ini mencakup seluruh kegiatan pembangunan fisik konstruksi baik berupa gedung, jalan, jembatan, terminal, pelabuhan dan irigasi dan sebagainya yang dibiayai oleh APBN maupun APBD serta perbaikannya dan pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh developer, BTN, REI dan swadaya murni dan biaya antara sub sektor sewa bangunan. Data harga dan data primer diperoleh dari survei perusahaan konstruksi BPS Kota Blitar dan data sekunder dari Bagian Pembangunan Setda Kota Blitar.

f. Perdagangan, Hotel dan Restoran



Gambar 9. Angka PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kota Blitar Tahun 2007-2011

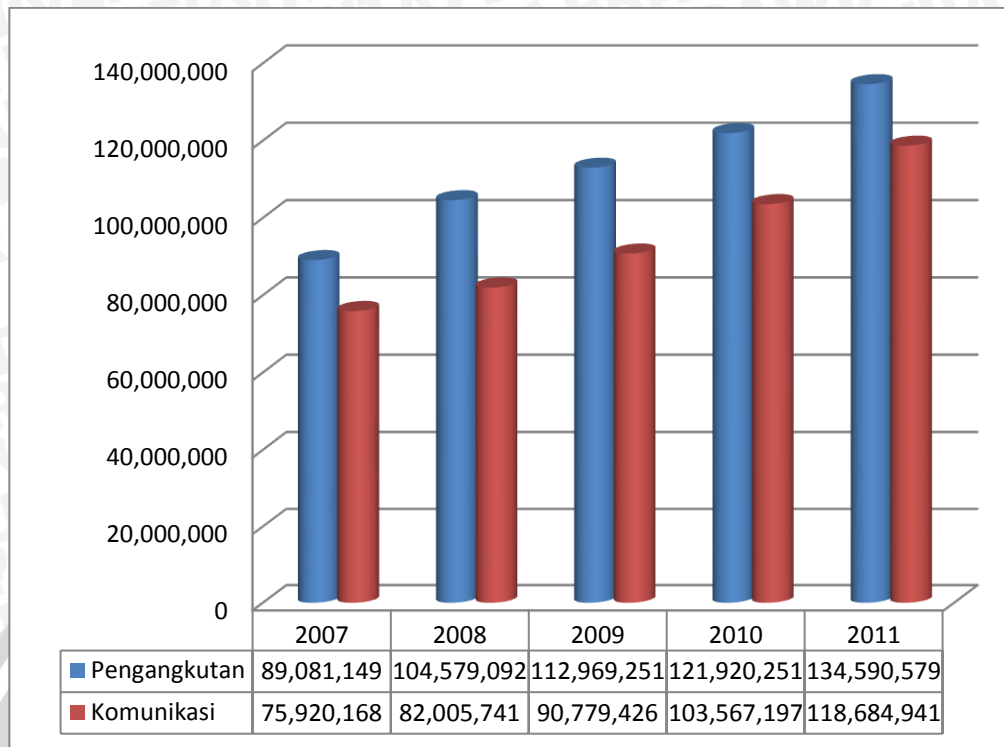
Sektor ini terdiri dari tiga subsektor yaitu perdagangan, hotel dan restoran. Pada dasarnya kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan perdagangan, penyediaan akomodasi/hotel, serta penjualan makanan dan minuman seperti restoran, warung makan, kedai, pedagang keliling dan sejenisnya.

- 1. Perdagangan.** Perhitungan nilai tambah atas dasar harga berlaku subsektor usaha perdagangan dilakukan dengan pendekatan arus barang. Output diperoleh dengan mengalikan besarnya nilai produksi komoditi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri serta produk luar daerah yang diperdagangkan dengan margin perdangan dan penghitungan nilai tambah yang diperoleh dari data hasil penyusunan tabel Input Output Indonesia 2000 serta survei khusus dari

Provinsi Jawa Timur. Produk luar daerah dihitung dengan pendekatan konsumsi rumah tangga dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

2. **Hotel.** Kegiatan subsektor hotel mencakup usaha di bidang perhotelan, penginapan dan sejenisnya. Output diperoleh dari survei VHTS yang dilakukan setiap tahun oleh BPS Kota Blitar dan rasio nilai tambah diperoleh dari hasil SKPR.
3. **Restoran.** Kegiatan subsektor ini mencakup usaha kegiatan penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan baik dengan tempat tetap maupun tidak tetap, termasuk pedagang makanan/minuman keliling. Data diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan hasil SKPR.

g. Pengangkutan dan Komunikasi



Gambar 10. Angka PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Kota Blitar Tahun 2007-2011

Sektor usaha ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang, jasa penunjang angkutan dan komunikasi. Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor. Adapun subsektor yang termasuk dalam sektor ini adalah sebagai berikut.

1. Pengangkutan

- a. Angkutan Rel. Usaha ini mencakup kegiatan penumpang maupun barang dengan menggunakan kendaraan kereta api. Data produksi dan harga diperoleh dari PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) Stasiun Blitar.

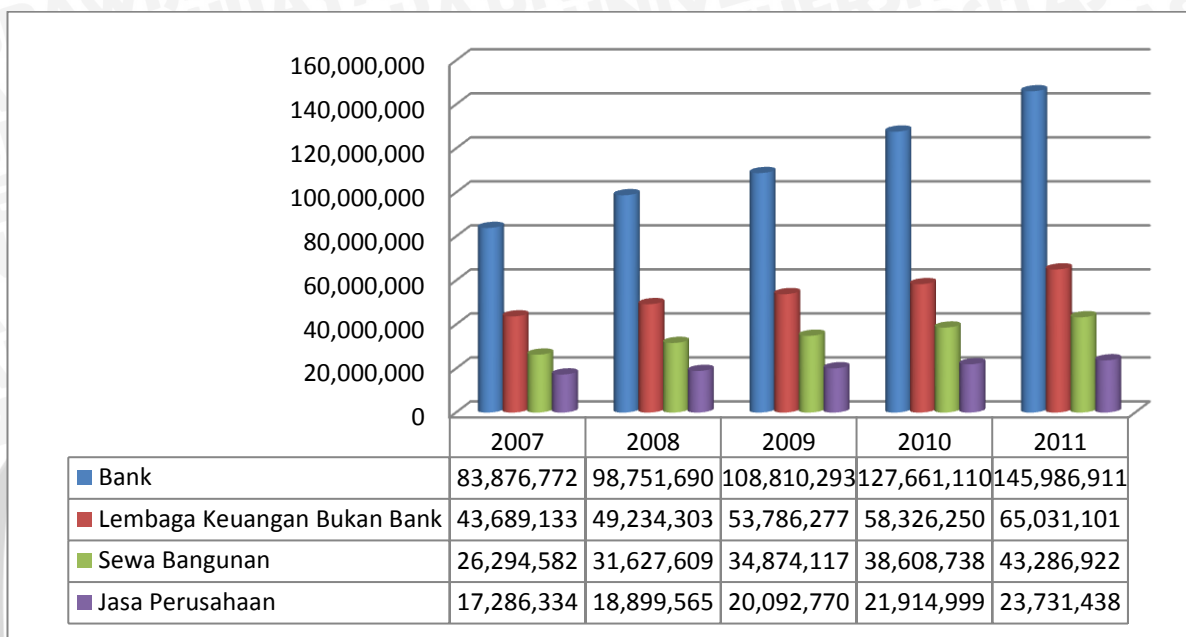
- b. Angkutan Jalan Raya. Usaha ini meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, baik bermotor maupun tidak bermotor seperti bus, truk, becak, dokar, ojek, kol dan sebagainya. Data produksi dan harga diperoleh dari hasil SKPR.
- c. Jasa Penunjang Angkutan. Jenis usaha ini mencakup kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang bersifat menunjang dan memperlancar usaha pengangkutan meliputi pelayanan jasa terminal dan parkir, keagenan, ekspedisi, bongkar muat, pergudangan, jalan tol dan sejenisnya.

2. Komunikasi

- a. Pos dan Telekomunikasi. Untuk bidang pos usaha ini mencakup pemberian jasa pos dan giro seperti pengiriman surat, wesel, paket, jasa giro, jasa tabungan dan sebagainya. Dan untuk bidang telekomunikasi usaha ini mencakup pemberian jasa dalam hal pemakaian hubungan telepon, telegram, faksimili dan teleks. Data produksi dan harga diperoleh dari Kantor Pos dan Giro Kota Blitar dan Kantor Telkom Cabang Kota Blitar.
- b. Jasa Penunjang Telekomunikasi. Usaha ini mencakup jasa yang menunjang kegiatan pos, giro dan telekomunikasi yang belum tercakup di atas antara lain penjuala benda pos dan usaha telekomunikasi yang dilakukan perorangan/ badan usaha tertentu

lainnya (wartel). Data produksi dan harga diperoleh dari Kantor Telkom Cabang Kota Blitar.

h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan



Gambar 11. Angka PDRB Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Kota Blitar Tahun 2007-2011

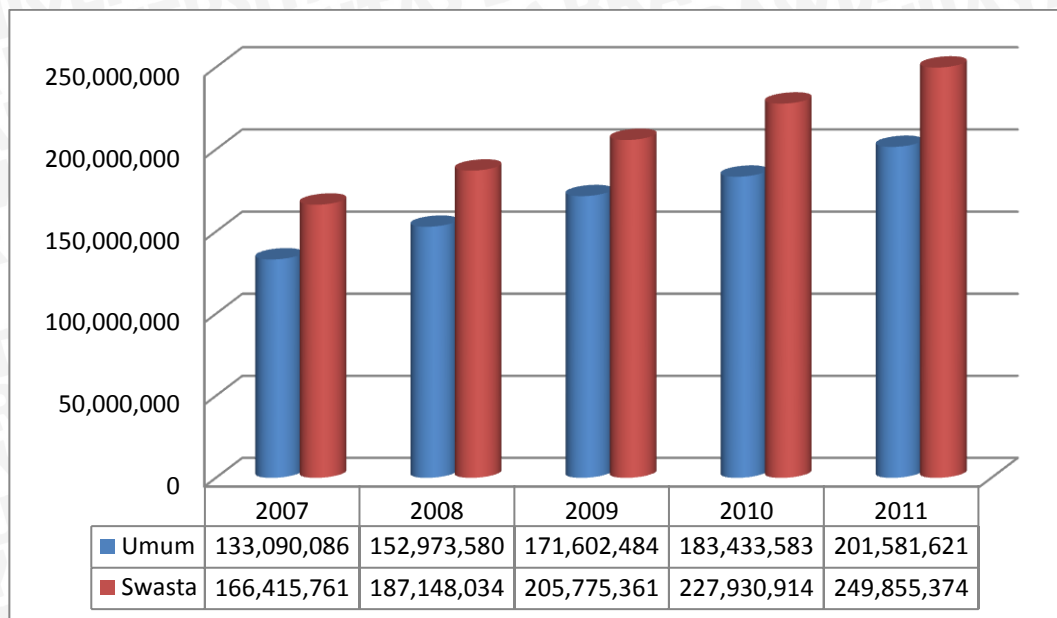
Sektor usaha ini meliputi beberapa subsektor yang diuraikan di bawah ini :

- 1. Bank.** Angka nilai tambah bruto subsektor usaha bank atas dasar harga berlaku dan konstan 2000 diperoleh berdasarkan alokasi dari BPS Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari laporan Bank Indonesia Pusat. Dalam PDRB seri terbaru ini, nilai tambah bruto yang ditimbulkan dari kegiatan Bank Indonesia tidak mencakup pembayaran bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan pinjaman dari luar negeri karena hal tersebut merupakan kebijakan moneter yang bukan merupakan kegiatan komersial perbankan. Pada PDRB seri lama masih mencakup hal tersebut.



2. **Lembaga Keuangan Bukan Bank.** Kegiatan usaha keuangan bukan bank meliputi kegiatan asuransi, dana pensiun, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan (pembiayaan konsumen, model ventura, dan lain-lain) dan sebagainya. Data produksi dari hasil SKPR.
3. **Sewa Bangunan.** Subsektor usaha ini mencakup semua kegiatan jasa atas penggunaan rumah bangunan sebagai tempat tinggal rumah tangga dan bukan sebagai tempat tinggal, tanpa memperhatikan apakah bangunan itu milik sendiri atau disewa. Output diperoleh dari pengeluaran konsumsi rumah tangga khususnya pengeluaran untuk sewa dan rasio nilai tambah dari hasil SKPR.
4. **Jasa Perusahaan.** Subsektor usaha ini meliputi jasa pengacara, jasa akuntan, biro arsitektur, jasa pengolahan data, jasa periklanan, fotokopi, jasa persewaan alat-alat pesta dan sebagainya. Data produksi dari BPS Kota Blitar dan hasil SKPR.

- i. **Jasa-Jasa**



Gambar 12. Angka PDRB Sektor Jasa-Jasa Kota Blitar Tahun 2007-2011

Sektor ini dibagi menjadi dua subsektor yaitu jasa pemerintahan umum, dan jasa swasta. Jasa pemerintahan umum meliputi jasa pemerintahan, administrasi pemerintahan dan pertahanan keamanan. Jasa swasta meliputi jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan dan jasa perorangan rumah tangga.

1. **Jasa Pemerintahan Umum.** Nilai tambah bruto subsektor usaha jasa pemerintahan umum dari jumlah upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah, perkiraan komponen upah dari belanja pembangunan ditambah dengan perkiraan penyusutan sebesar lima persen dari total gaji yang telah dihitung. Data produksi diperoleh dari Dinas Instansi Vertikal di Kota Blitar dan BPS Provinsi Jawa Timur.
2. **Jasa Sosial Kemasyarakatan.** Subsektor usaha ini mencakup jasa pendidikan, jasa kesehatan, serta jasa kemasyarakatan lainnya seperti jasa penelitian, jasa palang merah, panti asuhan, panti wreda, yayasan pemeliharaan anak cacat, dan rumah ibadah. Kegiatan-kegiatan jasa

sosial dan kemasyarakatan hanya terbatas yang dikelola di luar pemerintah. Adapun kegiatan sejenis yang dikelola pemerintah termasuk dalam sektor usaha pemerintahan.

a. **Jasa Pendidikan.** Perkiraan output sektor ini adalah perkalian antara murid sekolah swasta menurut jenjang pendidikan yang datanya diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan biaya pendidikan selama satu tahun untuk masing-masing jenjang pendidikan yang diperoleh dari pengumpulan data sekunder setiap tahun oleh BPS.

b. **Jasa Kesehatan.** Subsektor jasa kesehatan mencakup jasa rumah sakit swasta, rumah bersalin, dokter praktik, dan jasa kesehatan lainnya yang dikelola oleh swasta.

c. **Jasa Sosial dan Kemasyarakatan Lainnya.** Output/ nilai bruto diperoleh dengan cara mengalikan jumlah anak yang diasuh dengan rata-rata outputnya. Data jumlah anak asuh diperoleh dari Dinas Sosial Kota Blitar. Demikian pula untuk ibadah, dan rata-rata input ibadah dikalikan dengan jumlah tempat ibadah di Kota Blitar.

3. Jasa Hiburan dan Kebudayaan. Subsektor ini mencakup jasa bioskop, panggung hiburan kesenian, radio swasta, rumah bilyar, televisi swasta dan sebagainya. Data produksi dan harga diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan BPS Kota Blitar.

4. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga. Subsektor ini meliputi segala jenis kegiatan jasa yang pada umumnya melayani perorangan dan

rumah tangga yang terdiri dari jasa perbengkelan, reparasi, jasa pembantu rumah tangga dan jasa perorangan lainnya. Data diperoleh dari hasil SKPR.

2. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor

Dalam pertumbuhan perekonomian suatu daerah, dapat dilihat angka pertumbuhannya dan klasifikasi berdasarkan sektor. Dibawah ini tabel yang menunjukkan pertumbuhan perekonomian dan kontribusi dari masing-masing sektor dalam PDRB tahun 2007 – 2011.

Tabel 4. Pertumbuhan Per Sektor Perekonomian Kota Blitar Tahun 2007-2011

Sektor / Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010	2011
1. Primer	1,23	0,97	5,12	4,48	4,69
a. Pertanian	1,26	0,99	5,15	4,87	4,75
b. Pertambangan dan penggalian	-8,38	-5,24	-3,27	-2,67	-19,92
2. Sekunder	5,37	5,36	6,63	4,94	5,30
a. Industri pengolahan	4,97	2,73	5,00	3,34	4,98
b. Listrik, gas dan air	7,35	7,86	6,62	5,08	4,78
c. Bangunan	5,83	12,42	11,19	9,13	6,28
3. Tersier	6,91	7,04	6,21	6,78	7,06
a. Perdagangan, hotel dan restaurant	6,52	9,05	8,46	8,74	8,68
b. Angkutan dan komunikasi	12,11	7,43	5,30	5,83	7,77
c. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	5,14	5,99	4,51	5,66	7,00
d. Jasa-jasa	5,33	4,70	4,59	5,18	4,25
Pertumbuhan Ekonomi	6,19	6,29	6,21	6,32	6,59

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan masing-masing sektor berbeda-beda namun secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kota Blitar mengalami peningkatan. Rincian pertumbuhan sektoral adalah sebagai berikut :

1. Untuk sektor primer pada tahun 2011 laju pertumbuhannya melemah dari 4,85 turun menjadi 4,69. Melambatnya laju pertumbuhan di sektor primer disebabkan karena melambatnya laju pertumbuhan sektor pertanian maupun pertambangan penggalian. Bahkan sektor pertambangan dan

penggalan kembali mengalami pertumbuhan negatif 19,92. Artinya, produksi sektor penggalan (penggalan pasir dan batu) turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Keterbatasan sumber daya alam menjadi faktor utama penurunan produksi.

2. Untuk sektor sekunder tahun sebelumnya sempat mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi sektor sekunder pada tahun 2011 menjadi 5,3. Kenaikan pertumbuhan pada sektor ini lebih dikarenakan naiknya laju pertumbuhan di subsektor industri pengolahan. Subsektor listrik, gas dan air mengalami perlambatan pertumbuhan. Sedangkan subsektor bangunan dalam lima tahun tersebut mengalami pertumbuhan paling tinggi di sektor sekunder.
3. Untuk sektor tersier merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi Kota Blitar. Sektor perdagangan, hotel dan restaurant yang merupakan leading sektor tumbuh 8,68 sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Di bidang perdagangan, pemerintah terus berupaya untuk melindungi pedagang kecil dari pedagang –pedagang ritel. Perda yang berpihak kepada pedagang kecil antara lain izin mendirikan supermarket atau swalayan hanya diberikan untuk wilayah ring saru dengan jarak tertentu, larangan pendirian departemen store dan lain-lain. Pertumbuhan yang terjadi di subsektor angkutan dan komunikasi lebih dikarenakan pertumbuhan pada angkutan jalan raya dan jasa penunjang angkutan.

3. Pariwisata dan Budaya

a. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang penting dan strategis bagi Kota Blitar, karena perannya sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Kota Blitar. Dapat dikatakan bahwa pariwisata Kota Blitar saat ini dan ke depan memiliki prospek yang baik dan memiliki daya tarik yang kompetitif terutama dengan keberadaan makam Bung Karno sebagai ikon pembeda dengan daerah-daerah lain.

Untuk itu, komitmen dan konsisten pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penerapannya perlu dititikberatkan pada strategi pengembangan obyek wisata sejarah; memanfaatkan posisi kota Blitar yang berada di antara daerah tujuan wisata Bali, Malang dan Jogjakarta; meningkatkan citra kota Blitar sebagai laboratorium kebangsaan dengan menggelar event yang mendukung; pengembangan pemasaran dan promosi yang tepat dengan menggunakan media yang ada; serta pengembangan kemitraan, investasi dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya meningkatkan kapasitas kepariwisataan di Kota Blitar tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama kunjungan wisatawan, sehingga mereka akan lebih banyak membelanjakan uangnya di kota Blitar yang pada akhirnya memberikan multiplier effect untuk semakin meningkatkan akselerasi perputaran roda ekonomi Kota Blitar.

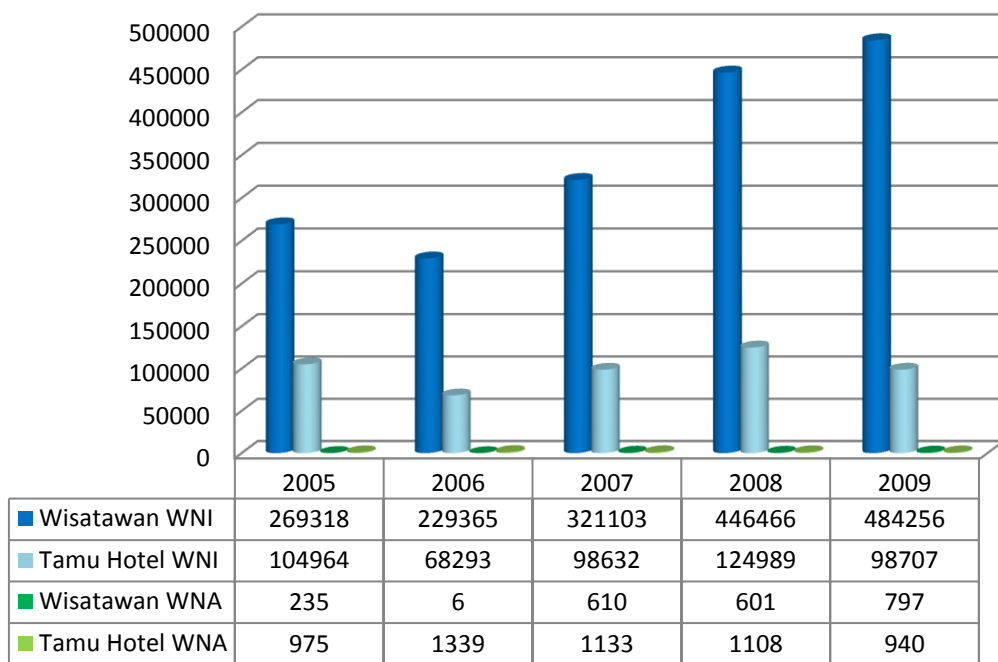
Tercatat ada sejumlah obyek wisata di kota Blitar yaitu terdiri atas obyek wisata buatan dan sejarah. Obyek wisata buatan yaitu

Kebon Rojo, Water Park Sumber Udel dan Kampung Wisata Kelurahan Tanggung. Sedangkan onyek wisata sejarah atau minat khusus yaitu Makam Aryo Blitar, Monumen PETA, Ndalem Gebang, Makam Proklamator dan Perpustakaan Bung Karno yang merupakan obyek wisata baru. Wisata sejarah, religi dan hiburan ini dalam setiap tahun ramai dikunjungi wisatawan khususnya pada event Grebeg Pancasila dan Haul Bung Karno.

b. Sarana dan prasarana pariwisata

Sampai dengan akhir tahun 2009 jumlah jasa akomodasi di Kota Blitar tidak terlalu banyak mengalami perubahan dari segi jumlah dari tahun 2005 sampai tahun 2009 hanya bertambah satu unit. Sedangkan dilihat dari jumlah tempat tidur mengalami perubahan dari 775 menjadi 802 unit sedangkan pada penginapan jumlahnya tetap akan tetapi jumlah tempat tidurnya menurun.

Jumlah kunjungan wisatawan ke kota Blitar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, sebagaimana yang ditampilkan pada grafik di bawah ini. Namun kunjungan wisatawan tidak sebanding dengan tamu hotel yang menginap, terutama tamu hotel pada wisatawan asing.



Gambar 13. Kunjungan Wisatawan ke Kota Blitar Tahun 2005-2009

c. Budaya masyarakat

Pengembangan kebudayaan di Kota Blitar diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat budaya lokal di tengah pengaruh gelombang besar budaya global dengan segala pernak perniknya baik yang bersifat positif maupun negatif. Berkembangnya kebudayaan lokal sebagai jati diri bangsa akan memperkuat citra kota Blitar sebagai “Laboratorium Kebangsaan” sekaligus menegaskan kota Blitar sebagai kota pariwisata sejarah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kebudayaan di kota Blitar antara lain dengan menggali seni dan budaya tradisional agar tetap lestari, kemudian mengembangkan menjadi kesenian yang bisa diterima dan dinikmati generasi masa kini, sekaligus sebagai inspirasi munculnya seni dan budaya baru yang penuh dengan nilai-nilai kearifan lokal.

C. Analisis Data

1. Identifikasi Potensi Sektor Pariwisata, Perdagangan dan Jasa

Untuk mengetahui potensi sektor-sektor ekonomi yang mendukung PDRB Kota Blitar, digunakan analisis LQ yaitu untuk mengetahui sektor-sektor manakah yang basis dan non basis. Apabila hasil perhitungannya menunjukkan angka lebih dari 1 ($LQ > 1$) berarti sektor tersebut adalah sektor basis dan dimungkinka untuk diekspor ke daerah lain di luar kota Blitar. Sebaliknya apabila hasilnya menunjukkan angka kurang dari 1 ($LQ < 1$) berarti sektor tersebut bukan sektor basis dan dimungkinkan mengimport sektor dari daerah lain. Tahun analisis yang digunakan adalah tahun 2007 sampai tahun 2009 dengan data PDRB Kota Blitar Atas Dasar Harga Berlaku. Analisis data disajikan per tahun kemudian diambil rata-rata dari hasil nilai LQ tersebut.

a. Analisis Tahun 2007

Tabel 5. Analisis LQ Sembilan Sektor PDRB ADHB Kota Blitar Tahun 2007

Sektor PDRB 2007	Kota Blitar (Rp 000)	Jawa Timur (Rp 000)	y	x	Indeks LQ (y/x)
Pertanian	115743884	89627587450	0,083785061	0,166909891	0,501977804
Pertambangan dan Penggalian	433734	11651721500	0,000313973	0,021698537	0,014469767
Industri Pengolahan	164721994	154363456100	0,119239495	0,287464924	0,414796675
Listrik, Gas dan Air	20046061	8546731790	0,014511008	0,015916239	0,911710888
Konstruksi	58259624	21100431350	0,042173167	0,039294494	1,073258936
Perdagangan, Hotel dan Restaurant	386481220	150733654300	0,279767287	0,280705289	0,996658412
Pengangkutan dan Komunikasi	165001317	28576726610	0,119441692	0,053217301	2,244414677

Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	171244526	25255804600	0,123961047	0,04703288	2,635625242
Jasa	299505847	47125768210	0,21680727	0,087760444	2,470444102
Total PDRB	1381438207	536981881910	1	1	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sektor basis Kota Blitar pada tahun 2007 adalah sektor kontruksi (1,07); pengangkutan dan komunikasi (2,24); keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,63) dan jasa (2,47). Sedangkan lima sektor lainnya yaitu pertanian (0,5); pertambangan dan penggalian (0,01); industri pengolahan (0,41); listrik, gas dan air (0,91); perdagangan, hotel dan restaurant (0,99) merupakan sektor non basis.

b. Analisis Tahun 2008

Tabel 6. Analisis LQ Sembilan Sektor PDRB ADHB Kota Blitar Tahun 2008

Sektor PDRB 2008	Kota Blitar (Rp 000)	Jawa Timur (Rp 000)	y	x	Indeks LQ (y/x)
Pertanian	125819725	102815940420	0,078665786	0,165460763	0,47543469
Pertambangan dan Penggalian	436077	13811999330	0,000272647	0,022227526	0,012266177
Industri Pengolahan	186890295	176922161820	0,116848706	0,284719234	0,410399761
Listrik, Gas dan Air	22448091	9789252590	0,014035134	0,015753756	0,890907196
Konstruksi	72593943	24142668270	0,045387634	0,038852578	1,168201357
Perdagangan, Hotel dan Restaurant	465906649	177014046590	0,291297036	0,284867104	1,022571691
Pengangkutan dan Komunikasi	186584833	32649780820	0,116657723	0,052542997	2,220233521

Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	198619954	29734777580	0,124182396	0,047851909	2,59513987
Jasa	340121614	54511047190	0,212652938	0,087724135	2,424109834
Total PDRB	1599421181	621391674610	1	1	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor basis kota Blitar pada tahun 2008 adalah sektor konstruksi (1,16); perdagangan, hotel dan restaurant (1,02); pengangkutan dan komunikasi (2,22); keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,59) dan jasa (2,42). Sedangkan empat sektor lainnya yaitu pertanian (0,47); pertambangan dan penggalian (0,01); industri pengolahan (0,41) dan listrik, gas dan air (0,89) merupakan sektor non basis.

c. Analisis Tahun 2009

Tabel 7. Analisis LQ Sembilan Sektor PDRB ADHB Kota Blitar Tahun 2009

Sektor PDRB 2009	Kota Blitar (Rp 000)	Jawa Timur (Rp 000)	y	x	Indeks LQ (y/x)
Pertanian	143760118	112233859160	0,079866835	0,163404322	0,488768193
Pertambangan dan Penggalian	443160	15275669630	0,0002462	0,022240262	0,011070028
Industri Pengolahan	211862070	193256482060	0,117701301	0,281367357	0,418318964
Listrik, Gas dan Air	25198482	10625414010	0,013999175	0,015469829	0,904934051
Konstruksi	87949113	27552354800	0,048860681	0,040114221	1,218038886
Perdagangan, Hotel dan Restaurant	531979398	195184787500	0,29554449	0,284174829	1,040009388
Pengangkutan dan Komunikasi	203748677	37785346570	0,113193855	0,055012712	2,057594543
Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	217678821	33145827890	0,120932834	0,04825791	2,505969135

Jasa	377377845	61787816100	0,209654628	0,089958558	2,330569008
Total PDRB	1799997684	686847557720	1	1	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor basis kota Blitar pada tahun 2009 adalah sektor konstruksi (1,21); perdagangan, hotel dan restaurant (1,04); pengangkutan dan komunikasi (2,05); keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,5) dan jasa (2,33). Sedangkan empat sektor lainnya yaitu pertanian (0,48); pertambangan dan penggalian (0,01); industri pengolahan (0,41) dan listrik, gas dan air (0,9) merupakan sektor non basis.

d. Analisis Tahun 2010

Tabel 8. Analisis LQ Sembilan Sektor PDRB ADHB Kota Blitar Tahun 2010

Sektor PDRB 2010	Kota Blitar (Rp)	Jawa Timur (Rp)	y	x	Indeks LQ (y/x)
Pertanian	156317770	122623967680	0,076981823	0,157499818	0,488774046
Pertambangan dan Penggalian	441455	17030742770	0,000217403	0,021874507	0,009938664
Industri Pengolahan	233162937	214024729370	0,114825768	0,274896145	0,417705998
Listrik, Gas dan Air	28931864	11768641200	0,014248077	0,015115796	0,942595242
Konstruksi	105934815	34993979710	0,052169726	0,044946722	1,160701451
Perdagangan, Hotel dan Restaurant	622305378	229404871550	0,306466774	0,294650599	1,040102328
Pengangkutan dan Komunikasi	225487448	42947758980	0,11104582	0,05516266	2,013061369
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	246634081	38165173520	0,121459904	0,049019845	2,477770046
Jasa	411364497	67605907670	0,202584704	0,086833907	2,33301381
Total PDRB	2030580245	778565772450	1	1	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor basis kota Blitar pada tahun 2010 adalah sektor konstruksi (1,16); perdagangan, hotel dan restaurant (1,04); pengangkutan dan komunikasi (2,01); keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,47) dan jasa (2,33). Sedangkan empat sektor lainnya yaitu pertanian (0,48); pertambangan dan penggalian (0,009); industri pengolahan (0,41) dan listrik, gas dan air (0,94) merupakan sektor non basis.

e. Analisis Tahun 2011

Tabel 9. Analisis LQ Sembilan Sektor PDRB ADHB Kota Blitar Tahun 2011

Sektor PDRB 2011	Kota Blitar (Rp)	Jawa Timur (Rp)	y	x	Indeks LQ (y/x)
Pertanian	170025028	136027919630	0,074788403	0,153852749	0,486103782
Pertambangan dan Penggalian	359578	19794059020	0,000158167	0,022387833	0,007064842
Industri Pengolahan	256836459	239844520360	0,112973889	0,271273272	0,416457871
Listrik, Gas dan Air	31172461	12690733030	0,013711738	0,014353702	0,955275377
Konstruksi	118298135	41295649140	0,052035449	0,046706949	1,114083654
Perdagangan, Hotel dan Restaurant	713852130	265238859620	0,314000013	0,299995235	1,046683334
Pengangkutan dan Komunikasi	253275519	50044951420	0,111407549	0,056602743	1,968235875
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	278158027	43570708230	0,122352544	0,049280128	2,482796814
Jasa	451436996	75636174350	0,198572249	0,085547389	2,321195899
Total PDRB	2273414333	884143574800	1	1	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor basis kota Blitar pada tahun 2011 adalah sektor konstruksi (1,11); perdagangan, hotel dan restaurant (1,04); pengangkutan dan komunikasi (1,96); keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,48) dan jasa (2,32). Sedangkan empat sektor lainnya yaitu pertanian (0,48); pertambangan dan penggalian (0,007); industri pengolahan (0,41) dan listrik, gas dan air (0,95) merupakan sektor non basis.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis data per tahun yang telah dijelaskan di atas, maka untuk mengetahui gambaran umum potensi ekonomi kota Blitar mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 perlu dilakukan penghitungan rata-ratanya yaitu dengan menjumlahkan hasil dari hasil perhitungan LQ dari tahun 2007 sampai tahun 2011 kemudian dibagi jumlah tahun analisis yaitu lima.

Tabel 10. Rata-rata Nilai LQ Sembilan Sektor ADHB Kota Blitar Tahun 2007-2011

Sektor PDRB	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
Pertanian	0,501977804	0,47543469	0,488768193	0,488774046	0,486103782	0,488211703
Pertambangan dan Penggalian	0,014469767	0,012266177	0,011070028	0,009938664	0,007064842	0,010961895
Industri Pengolahan	0,414796675	0,410399761	0,418318964	0,417705998	0,416457871	0,415535854
Listrik, Gas dan Air	0,911710888	0,890907196	0,904934051	0,942595242	0,955275377	0,921084551
Konstruksi	1,073258936	1,168201358	1,218038886	1,160701451	1,114083654	1,146856857
Perdagangan, Hotel dan Restaurant	0,996658412	1,022571691	1,040009388	1,040102328	1,046683334	1,029205031
Pengangkutan dan Komunikasi	2,244414677	2,22023352	2,057594543	2,013061369	1,968235875	2,100707997
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,635625242	2,59513987	2,505969135	2,477770046	2,482796814	2,539460221
Jasa	2,470444102	2,424109834	2,330569008	2,33301381	2,321195899	2,37586653

Berdasarkan tabel di atas maka dapat teridentifikasi secara keseluruhan mulai tahun 2007 sampai tahun 2011 sektor-sektor mana yang terdapat di kota Blitar yang merupakan sektor basis dan non basis. Sektor basis kota Blitar yaitu konstruksi (1,14); perdagangan, hotel dan restaurant (1,02); pengangkutan dan komunikasi (2,1); keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,53) dan jasa

(2,37). Kelima sektor ini merupakan sektor basis yang dimungkinkan untuk dilakukan ekspor ke daerah lain di luar kota Blitar. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kelima sektor tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan merupakan sektor potensial dimana sektor ini dapat ditingkatkan menjadi lebih baik sehingga memiliki berpengaruh yang kuat terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kota Blitar

Sedangkan empat sektor lainnya yaitu pertanian (0,48); pertambangan dan penggalian (0,01); industri pengolahan (0,41) dan listrik, gas dan air (0,92) merupakan sektor non basis. Sektor-sektor ini belum mampu memenuhi kebutuhan dalam kota Blitar, bahkan mengimport dari luar daerah. Sektor non basis bisa berkembang menjadi sektor basis baru dengan adanya dukungan perkembangan dari sektor basis. Maka dari itu, kebijakan yang mendukung sektor basis tidak boleh mengabaikan sektor non basis.

2. Ketepatan Kebijakan Pengembangan Potensi Daerah Kota Blitar

Untuk melihat ketepatan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Blitar, yaitu meningkatkan potensi pariwisata, perdagangan dan jasa, maka dapat dilihat dari tiga hal, yaitu kebijakan sektoral, besarnya alokasi dana untuk pengembangan potensi dan pengembangan investasi di dalam setiap potensi daerah.

a. Kebijakan Sektoral

Dengan melihat teori basis ekonomi dimana dijelaskan bahwa sektor basis dan non basis memiliki hubungan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin banyak kegiatan di sektor basis akan berpengaruh terhadap

permintaan barang dan jasa sehingga meningkatkan pendapatan ke dalam daerah dan juga meningkatkan volume kegiatan bukan basis.

Untuk meningkatkan kegiatan di sektor basis diperlukan kebijakan yang mendukungnya dan ini merupakan salah satu indikator kebijakan yang ideal yaitu kebijakan yang membangun keunggulan besaing. Penentuan kebijakan dalm hal ini tentunya dengan melihat sektor-sektor mana saja yang merupakn sektor basis dan non basis.

Kebijakan kota Blitar yang dituangkan dalam penjelasan visi dan misi kota Blitar adalah mengembangkan potensi pariwisata, perdagangan dan jasa. Dari hasil perhitungan yang ditampilkan di atas dapat dilihat sektor basis maupun non basis dari rata-rata jumlah nilai LQ selama lima tahun.

Tabel 11. Interpretasi Nilai LQ

Sektor PDRB	Rata-rata LQ	
Pertanian	0,488211703	Non Basis
Pertambangan dan Penggalian	0,010961895	Non Basis
Industri Pengolahan	0,415535854	Non Basis
Listrik, Gas dan Air	0,921084551	Non Basis
Konstruksi	1,146856857	Basis
Perdagangan, Hotel dan Restaurant	1,029205031	Basis
Pengangkutan dan Komunikasi	2,100707997	Basis
Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,539460221	Basis
Jasa	2,37586653	Basis

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa yang merupakan sektor basis adalah sektor kontruksi; perdagangan, hotel dan restaurant; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa. Maka kebijakan sektoral kota Blitar sudah tepat karena kebijakan tersebut mendukung perkembangan potensi pariwisata yang masuk dalam kategori jasa, dan

perdagangan yang merupakan sektor basis kota Blitar. Di antara keduanya yang memiliki nilai tinggi adalah sektor jasa.

b. Alokasi Dana Pengembangan Potensi Daerah

Visi misi kota Blitar yang mendukung pengembangan potensi pariwisata, perdagangan dan jasa diaplikasikan dalam berbagai macam program dan dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ditunjuk untuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan program- program tersebut.

Untuk mengembangkan potensi pariwisata SKPD yang bertanggung jawab adalah Dinas Komunikasi , Informasi dan Pariwisata Daerah Kota Blitar (Diskominpar).

Untuk mengembangkan potensi perdagangan SKPD yang bertanggungjawab adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar (Disperindag) dan Kantor Pasar Daerah. Untuk mengembangkan potensi jasa secara keseluruhan SKPD yang bertanggungjawab adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar (Dinsosnaker), Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) dan Kantor Polisi Pamong Praja.

Untuk melaksanakan dan mencapai keberhasilan program-program tersebut pemerintah kota Blitar menyiapkan perangkat salah satunya adalah alokasi dana. Alokasi dana untuk setiap program memiliki dua macam, yaitu alokasi dana untuk biaya operasional dan untuk biaya pengembangan potensi.

Untuk mencapai keberhasilan pengembangan potensi daerah tentunya harus didukung oleh alokasi dana yang proporsional untk memaksimalkan setiap program yang dijalankan, besarnya alokasi dana untuk pengembangan potensi

daerah yang telah ditetapkan harus lebih besar dari program yang lain. Dalam penelitian ini, analisis menggunakan data alokasi dana tahun 2013.

Tabel 12. Alokasi Dana SKPD Kota Blitar Tahun 2013

Nama SKPD	Jenis Biaya	Nama Program	Alokasi Dana (Rp)	Jumlah (Rp)			
Diskominpar (Pariwisata)	Operasional	Pelayanan Adminitrasi perkantoran	478928025	2514926075			
		Peningkatan sarana prasarana	1770804300				
		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9128700				
		Administrasi PPIP	256065050				
	Pengembangan Potensi	Pengembangan Nilai Budaya	300000000	6722983975			
		Pengembangan Pemasaran Pariwisata	197789550				
		Pengembangan Destinasi Pariwisata	3948711200				
		Pengelolaan Kekayaan Budaya	548374625				
		Kemitraan	241285100				
		Pengelolaan Keragaman Budaya	586823500				
		Pengembangan Pemasaran PPIP	900000000				
		Disperindag (Perdagangan)	Operasional		Pelayanan Adminitrasi perkantoran	220720550	274372950
					Peningkatan sarana prasarana	44832400	
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8820000						
	Pengembangan Potensi	Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi	366250500	3082972550			
		Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	181361250				
		Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	146495800				
		Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	551250000				
		Peningkatan UMKM	1837615000				
Pasar Daerah (Perdagangan)	Operasional	Pelayanan Adminitrasi perkantoran	252999350	288199350			
		Peningkatan sarana prasarana	27500000				
		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7700000				
	Pengembangan Potensi	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	371800000	371800000			
Dinsosnaker (Jasa)	Operasional	Pelayanan Adminitrasi perkantoran	239580000	4377645000			
		Peningkatan sarana prasarana	4120065000				
		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	18000000				
	Pengembangan Potensi	Pemberdayaan Fakir Miskin, Kom. Adat dan PMKS	470500000	8561795000			

		Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	3639500000	
		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	227295000	
		Peningkatan Kesempatan Kerja	997500000	
		Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	731750000	
		Pengelolaan Area Pemakaman	1278750000	
		Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1216500000	
Bakesbangpolinmas (Jasa)	Operasional	Pelayanan Adminitrasi perkantoran	189630000	233818000
		Peningkatan sarana prasarana	33075000	
		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11113000	
	Pengembangan Potensi	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	403187000	1856318850
		Pengembangan Wwasan Kebangsaan	631549000	
		Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	92857000	
		Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	166035000	
		Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	48096000	
		Pendidikan Politik Masyarakat	105000000	
		Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	409594850	
Kantor Polisi Pamong Praja (Jasa)	Operasional	Pelayanan Adminitrasi perkantoran	151580850	309858750
		Peningkatan sarana prasarana	114277900	
		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8000000	
		Peningkatan Disiplin Aparatur	36000000	
	Pengembangan Potensi	Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	746634550	746634550

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa biaya operasional setiap SKPD lebih kecil daripada biaya pengembangan potensi, hal ini menunjukkan kekonsistenan penetapan kebijakan dengan alokasi dana untuk kebijakan tersebut, karena prioritas kebijakan yang baik diikuti juga dengan prioritas alokasi dana kebijakan, yaitu biaya pengembangan potensi yang lebih besar daripada biaya operasional.

c. Pengembangan Investasi Potensi Daerah.

Kebijakan pengembangan potensi daerah sebaiknya diikuti dengan pengembangan investasi pada sektor tersebut, hal ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kegiatan dan pendapatannya yang tentunya berdampak baik untuk sektor basis maupun non basis.

Sesuai dengan data dari Kantor Bapeda kota Blitar, potensi pengembangan investasi Kota Blitar tahun 2013 diarahkan ke bidang-bidang tersebut, yaitu :

1. Bidang pertanian, yang meliputi tanaman padi, jagung, cabai, tomat, terong dan belimbing.
2. Bidang perkebunan, yang meliputi tanaman alpukat, mangga, rambutan, duku, langsung, jeruk keprok, pisang, sawo, nanas, salak, durian, jambu dan pepaya.
3. Bidang perikanan, yang meliputi perikanan darat seperti ikan gurami, lele, nila, patin, koi, komet dan koi mas.
4. Bidang peternakan, yang meliputi hewan sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ayam petelur, ayam pedaging, puyuh dan babi.
5. Bidang industri makanan dan minuman, yang meliputi sambal pecel, olahan belimbing, opak gambair, koyah, tahu, tempe, wajik kletik, keripik singkong rasa gadung, gula kelapa dan keripik buah.
6. Bidang industri kerajinan, yang meliputi kerajinan bubut kayu, tas tempurung kelapa, batik khas Blitar, logam pisau komando, logam lampu antik, lilin.

Dapat dilihat bahwa pengembangan investasi yang ditetapkan pemerintah belum diarahkan ke sektor pariwisata, jasa dan perdagangan. Hal ini tentunya menunjukkan terdapat ketidak konsistenan dalam mengembangkan potensi

tersebut, dan tentunya hal ini kurang baik. Pengarahan investasi ke sektor yang menjadi unggulan dan menjadi kebijakan sektoral pemerintah merupakan keharusan, dimana hal ini dapat meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk pembiayaan pengembangan potensi sektor tersebut, sebagai media promosi kepada investor-investor dan juga sosialisasi kepada masyarakat luas. Dengan demikian, sektor-sektor unggulan tersebut mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah itu sendiri dan juga dari luar pemerintah, dalam hal ini adalah investor, dan masyarakat daerah itu sendiri. Keterlibatan pemerintah, investor dan masyarakat akan sangat mempengaruhi perkembangan sektor-sektor unggulan tersebut ke arah yang lebih baik dan harapannya dapat menciptakan keunggulan bersaing.

3. Advokasi Kebijakan Pengembangan Potensi daerah Pemerintah Kota Blitar

a. Analisis Shift Share

Untuk memberikan advokasi kebijakan kepada pemerintah kota Blitar dalam mengembangkan potensi daerah sebagai upaya peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dulu hasil analisis shift share yang di dalamnya terdapat indeks-indeks indikator daya saing daerah, yaitu Proporsional Shift (Pj) dimana bila nilainya positif (+) maka sektor tersebut tumbuh lebih cepat di Kota Blitar dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Sebaliknya jika Pj bernilai negatif (-) maka sektor tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan Provinsi Jawa Timur.

Indeks lain adalah Differential Shift (Dj) dimana bila nilainya positif (+) maka sektor tersebut memiliki daya saing dibandingkan dengan Provinsi Jawa

Timur. Sebaliknya jika Dj bernilai negatif (-) maka sektor tersebut tidak memiliki daya saing, sektor ini dianggap kalah bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan dari luar yang masuk ke daerah. Dalam analisis ini digunakan data PDRB Kota Blitar Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2007 sampai 2011.

Tabel 13. Hasil Analisis SSA Sembilan Sektor PDRB ADHB Kota Blitar Tahun 2007-2011

Sektor PDRB	Proportional Shift (Pj)	Differential Shift (Dj)
Pertanian	74829047	-5639632,83
Pertambangan dan Penggalian	280411,38	-377253,583
Industri Pengolahan	106493661	897206,007
Listrik, Gas dan Air	12959887	1406789,78
Konstruksi	37665162	4278238,83
Perdagangan, Hotel dan Restaurant	249862200	33779464,5
Pengangkutan dan Komunikasi	106674244	-35682800,3
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	110710513	-17268921,2
Jasa	193632151	-29265543,7

Dari tabel di atas dapat dilihat sektor-sektor yang pertumbuhannya lebih cepat dari provinsi adalah sektor yang nilai Propotional Shiftnya bernilai positif yaitu semua sektor dalam PDRB. Nilai tertinggi yaitu pada sektor perdagangan, hotel dan restaurant menyusul kemudia sektor jasa. Dengan demikian sektor perdagangan, hotel dan restaurant dan sektor jasa harus didukung kebijakan untuk memacu pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi lagi.

Untuk melihat sektor-sektor yang memiliki daya saing adalah sektor yang nilai Differential Shiftnya bernilai positif yaitu sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air; konstruksi; dan perdagangan, hotel dan restaurant. Yang mempunyai

daya saing tertinggi adalah sektor industri pengolahan, dan terendah adalah sektor listrik, gas dan air.

Sedangkan Differential Shift yang bernilai negatif, yang menandakan tidak mempunyai daya saing adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa. Dari sektor-sektor tersebut yang paling rendah daya saingnya adalah sektor pariwisata yang memiliki nilai negatif terbanyak.

Dari kesimpulan di atas mengenai potensi yang memiliki daya saing, yang perlu didukung dengan kebijakan adalah sektor jasa yang termasuk di dalamnya sektor pariwisata yang perannya sebagai lokomotif penggerak perekonomian di Kota Blitar, karena daya saingnya sangat rendah walaupun sektor jasa ini merupakan sektor basis. Perlu kebijakan untuk mengembangkan dan mendorong sektor ini untuk mencapai tujuan peningkatan daya saing sesuai dengan penjelasan visi kota Blitar.

b. Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Blitar selain memperhatikan keselarasan dengan visi misi dan membutuhkan konsistensi kebijakan, perlu ditekankan juga bahwa kemajuan di sektor pariwisata akan berdampak kenaikan pendapatan asli daerah karena pariwisata merupakan lokomotif penggerak perekonomian, selain itu pengembangan sektor pariwisata sangat memungkinkan adanya penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat yang berimplikasi akan menaikkan kenaikan pendapatan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pengembangan pariwisata diharapkan dapat menjadikan semakin

meningkatnya potensi pada sektor perdagangan dan jasa yang sudah merupakan sektor basis, dan juga sebagai pendorong meningkatnya sektor-sektor lain untuk menjadi sektor basis yang baru. Dengan demikian akan meningkatkan perekonomian Kota Blitar secara umum.

Selain dukungan dalam hal kebijakan, pengembangan pariwisata harus didukung dengan beberapa hal kreatif yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar, antara lain :

1. Promosi yang agresif. Promosi yang agresif bisa dilakukan dengan memanfaatkan media radio, televisi dan internet untuk sasaran wisatawan yang beih banyak. Memaksimalkan media televisi dan internet yang sekarang ini belum dipakai, padahal media tersebut adalah media yang banyak sekali menjangkau masyarakat luas. Yang dipromosikan tentu kegiatan-kegiatan pariwisata yang sudah disusun sedemikian menarik termasuk tempat-tempat wisatanya. Dengan media internet tentu lebih mudah dan banyak aplikasi online sosial yang banyak, bisa menggunakan dan mengelola blog informasi pariwisata yang ada di Kota Blitar, media Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya.
2. Memaksimalkan informasi pariwisata. Informasi pariwisata Kota Blitar sekarang ini terpusat di satu tempat yang yang berada di Kantor Pusat Pelayanan Informasi Pariwisata (PIIP), masih sedikit informasi pariwisata yang diletakana di tempat-tempat umum. Hal ini perlu dilakukan agar informasi mudah di dapatkan oleh masyarakat luar, terutama yang berasal dari luar daerah. Informasi pariwisata dapat berupa peta wisata, agenda kegiatan-kegiatan wisata dan biaya masuk, informasi paket-paket wisata.

Informasi pariwisata dapat diletakan di tempat-tempat umum seperti di hotel, pinggir jalan ring road, terminal, stasiun kereta api, gedung-gedung pertemuan dan tempat-tempat pariwisata itu sendiri.

3. Penarikan kunjungan wisatawan yang sebanyak-banyaknya. Menurut French (1996) faktor-faktor yang menjadikan banyak wisatawan tertarik untuk berkunjung ke suatu daerah wisata yaitu :

- a. *Attraction*. Daya tarik tepat wisata meliputi keindahan alam, budaya, maupun keindahan wisata buatan.
- b. *Accessibility*. Meliputi sarana dan prasara untuk mencapai tempat wisata seperti kondisi jalan raya, sarana transportasi, dan kemudahan mendapatkan transportasi.
- c. *Amenity*. Kenyamanan di tempat wisata menjadi daya tarik yang penting juga, seperti kondisi tempat wisata dan fasilitas lain yang bersih, lahan parkir yang memadai, kemanan diri dan barang-barang bawaan. Termasuk di dalamnya keramah tamahan masyarakat dan petugas di tempat wisata dalam menjamu wisatawan.
- d. *Activity*. Berbagai aktivitas yang dapat dilakukan di suatu tempat wisata tertentu menjadi salah satu penarik kunjungan wisata, wisatawan akan melakukan berbagai macam kegiatan di sana sesuai dengan keinginan dan tempat wisata yang dikunjungi.

Menurut Murphy (1995), ada berbagai jenis akitivitas wisatawan yang dilakukan di tempat wisata, yaitu :

1. Apresiasi, yaitu aktivitas menikmati, fotografi

2. Simbolis ekstratif, yaitu kegiatan seperti memancing, berburu hewan, memetik buah-buahan
3. Bermain bebas secara pasif, yaitu kegiatan seperti membaca buku, memasak, bermain
4. Belajar secara sosial, yaitu kegiatan seperti mengunjungi teman, berbelanja, menyelenggarakan pesta
5. Ekspresif aktif, yaitu kegiatan seperti berenang, kegiatan di pantai, naik perahu, paralayang, arung jeram, dan lain-lain.

Upaya kreatif pemerintah yang perannya sebagai fasilitator, yaitu menciptakan wadah atau saluran untuk aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan di tempat wisata, karena fungsinya untuk menarik banyak wisatawan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan atau bahkan mungkin menciptakan wisata-wisata baru sesuai dengan tujuan aktivitas dan jenis wisatanya. Pengembangan pariwisata yang dapat dilakukan dapat dibedakan menjadi :

1. Wisata budaya, yang bertujuan untuk mengenalkan budaya.
2. Wisata bahari, yang meliputi wisata laut, sungai, danau, waduk.
3. Wisata cagar alam atau alam.
4. Wisata konvensi, seperti kegiatan rapat, pertemuan.
5. Wisata pertanian, meliputi perkebunan, hutan, desa.
6. Wisata berburu.
7. Wisata keagamaan, seperti ziarah, berkunjung ke candi, tempat ibadah.
8. Wisata kuliner, yang bertujuan untuk mengenalkan makanan khas, tradisional maupun makanan olahan kreatif.

Pengembangan pariwisata yang lain berdasarkan alasan atau tujuan wisatawan antara lain :

1. Pariwisata bisnis, yang meliputi usaha, dinas, kongres, seminar, convention, simposium
2. Pariwisata vokasi, yang dikarenakan adanya cuti atau berlibur
3. Pariwisata pendidikan, yang bertujuan untuk mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan.

Sedangkan pengembangan pariwisata berdasarkan objek antara lain :

1. Pariwisata budaya. Motivasi wisatawan melakukan perjalanan wisata disebabkan karena adanya faktor daya tarik seni budaya suatu tempat atau daerah.
2. Reoperasional wisata. Motivasi wisatawan melakukan perjalanan wisata adalah untuk menyembuhkan penyakit.
3. Wisata komersial. Wisata yang dilakukan karena adanya perdagangan nasional atau internasional seperti expo, fair, dan lain sebagainya.
4. Wisata olah raga. Wisatawan melakukan perjalanan wisata untuk menyaksikan suatu pesta olahraga, misalnya piala dunia, olimpiade
5. Wisata politik. Wisatawan melakukan perjalanan wisata untuk menyaksikan suatu kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara, misalnya hari angkatan perang.
6. Wisata sosial. Wisata yang tidak menekannya untuk mencari keuntungan misalkan study tour.
7. Wisata religi. Wisatawan melakukan perjalanan wisata untuk menyaksikan upacara keagamaan misalnya Ngaben.

Pemerintah kota Blitar dalam pengembangan pariwisata tentunya melihat jenis- jenis wisata apa saja yang memungkinkan untuk dikembangkan dan diciptakan, kondisi yang tidak memungkinkan untuk menciptakan suatu tempat wisata dapat digantikan dengan penciptaan wisata yang baru dengan media yang lain.

c. Advokasi Kebijakan

Kebijakan pengembangan daerah Kota Blitar dapat difokuskan pada pariwisata budaya yang selaras dengan tujuan pengembangan Kota Blitar sebagai “Laboratorium Kebangsaan” dapat dimulai dengan pengembangan kreatif atau penciptaan wisata yang belum ada sesuai dengan jenis-jenis pariwisata yang sudah dikemukakan di atas, antara lain :

1. Wisata budaya, yang bisa meliputi kegiatan Grebek pancasila yang sudah ada, pertunjukan tari-tarian tradisional Jawa Timur, khususnya Tari Emprak yang merupakan tari khas dari daerah masyarakat Blitar, pagelaran Wayang Kulit yang menjadi kesenian besar masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, dan pagelaran budaya lainnya. Selain wayang kulit, bisa berupa wayang orang yang juga masih merupakan kesenian Jawa. Pagelaran seni lain seperti campur sari, gendhing-gendhing Jawa, ludruk, ketoprak. Untuk wisatawan mancanegara bisa didampingi dengan *tourguide* untuk mengerti petunjuk apa yang ditampilkan. Kegiatan lain adalah Blitar Jadoel yang menampilkan sisi-sisi Blitar era sebelum penjajahan dan masa penjajahan.



Gambar 14. Tari Emprak

Keterangan : Tari emprak adalah tarian penyambut tamu yang biasa ditarikan di awal-awal acara resmi. Tarian ini bersumber dari kesenian Tayub dan Jaranan. Pertama kali muncul pada tahun 1988 pada acara Festival Tari Jawa Timur



Gambar 15. Kesenian Ludruk

Keterangan : Ludruk adalah kesenian drama tradisional yang dipergelarkan di atas panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan sehari-hari, cerita perjuangan dan sebagainya yang diselingi dengan lawakan dan musik tradisional.



Gambar 16. Grebeg Pancasila

Keterangan : Grebeg Pancasila merupakan agenda pawai atau arak-arakan untuk memperingati hari lahir Kota Blitar yang diadakan setiap 1 Juni, bertempat di alun-alun Kota Blitar dan berjalan menuju makam Bung Karno

2. Wisata dengan obyek bisnis, yang bisa meliputi pengadaan seminar kebudayaan dengan pembahasan kebudayaan Jawa, terutama Jawa Timur. Tempat seminar bisa menggunakan ruangan seminar dari Perpustakaan Bung Karno yang sudah tersedia fasilitas seminar di sana. Output dari seminar tersebut tentunya promosi pariwisata, dan juga sebagai sumber masukan untuk pengembangan wisata budaya dan juga pengenalan terhadap investor untuk menanamkan modal di Kota Blitar.



Gambar 17. Perpustakaan Bung Karno Kota Blitar

Keterangan : Perpustakaan Bung Karno merupakan perpustakaan dengan banyak sekali koleksi buku, terutama sejarah tentang Bung Karno, terdapat ruang seminar juga di dalamnya.

3. Wisata Komersial, bisa dengan pengadaan expo atau bazar perdagangan dengan tujuan mengenalkan dan memperdagangkan barang-barang khas daerah Blitar seperti Kendang Jimbe, batik khas Blitar, tas anyaman dari bambu dan rumput, aksesoris-aksesoris kerajinan dari kayu. Selain berupa barang-barang bisa berupa makanan-makanan khas Blitar seperti Sambel Pecel, Belimbing Karang Sari, Nanas dan Rambutan. Expo lebih menekankan untuk penarikan wisatawan dari luar daerah atau bahkan luar negeri, untuk masyarakat daerah bisa menggunakan kegiatan wisata pasar minggu.



Gambar 18. Kerajinan Kendang Jimbe

Keterangan : Kendang Jimbe merupakan alat musik tradisional unggulan kota Blitar yang biasa digunakan untuk mengiringi suatu tarian, nyanyian bahkan untuk ditarikan.



Gambar 19. Kerajinan Batik Jumput Khas Blitar

Keterangan : Batik Jumput adalah batik kain khas kota Blitar yang cara pembuatannya dengan mengikat kain yang mau dibatik

4. Wisata Sejarah. Kota Blitar banyak sekali memiliki tempat wisata sejarah, seperti Makam Bung Karno berikut orang tuanya, makam Aryo Blitar pendiri Kota Blitar, rumah masa kecil Bung Karno Ndalem Gebang, museum PETA. Dari wisata-wisata tersebut bisa dibuat paket wisata untuk wisatawan dan dipromosikan, ditambah dengan pertunjukan drama kolosal

PETA yang seharusnya rutin untuk diadakan, karena merupakan cerita historis yang terkenal di Kota Blitar, dan bisa menjadi event yang rutin.



Gambar 20. Makam Bung Karno

Keterangan : Makam Bung Karno merupakan tempat peristirahatan terakhir sang Poklamator yang letaknya di sebelah utara kota Blitar.



Gambar 21. Ndalem Gebang

Keterangan : Ndalem Gebang adalah tempat tinggal orang tua Bung Karo dan menjadi tempat singgah dan tempat berlibur waktu beliau liburan sekolah.

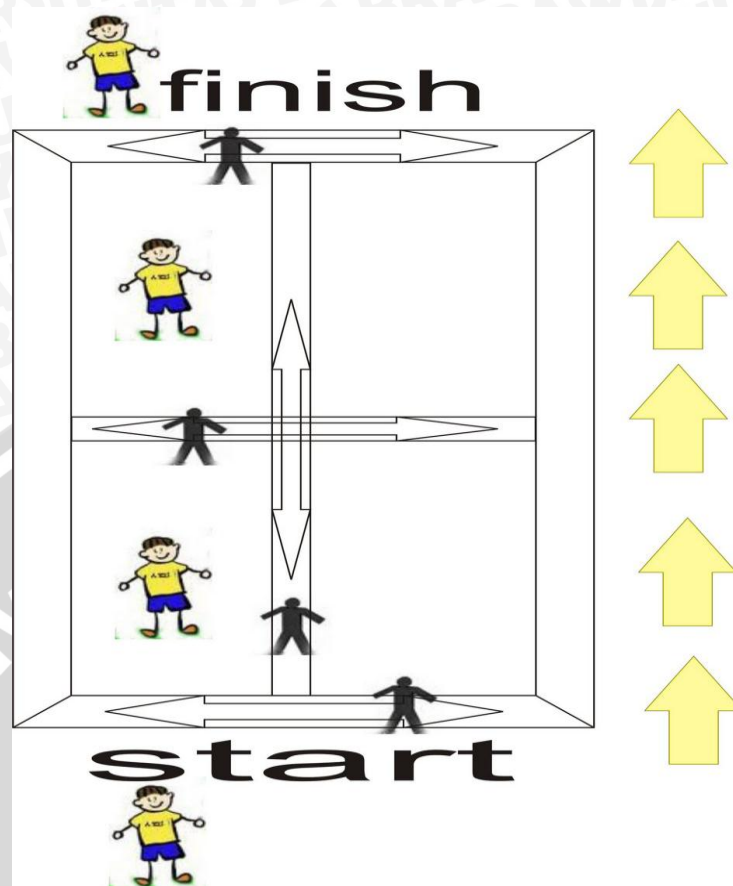
5. Wisata Olahraga. Bisa dikembangkan dengan pertunjukan kembali permainan-permainan tradisional yang mungkin sudah hilang, ini tentunya

menjadi daya tarik sendiri yang unik nantinya seperti kasti, enthik, gobak sodor, sepeda onthel, egrang, banyak generasi muda yang sudah lupa atau bahkan tidak mengenal lagi permainan-permainan seperti ini, sehingga perlu untuk dimunculkan lagi dan dikenalkan kepada masyarakat setempat, luar daerah maupun masyarakat dari luar negeri.



Gambar 22. Permainan Tradisional Dakon

Keterangan : Permainan dakon merupakan permainan tradisional yang melatih kemampuan otak dengan mengisi biji-bijian ke setiap lubang secara bergantian, ada 16 lubang pada setiap papan dakon.



Gambar 23. Permainan Tradisional Baksodor

Keterangan : Permainan tradisional baksodoar diaminkan oleh 4 sampai 10 orang, permainan ini melatih ketangkasan dan kecerdikan sebagaimana sejarahnya bahwa permainan ini dilakukan oleh para prajurit kerajaan untuk latihan ketrampilan dalam berperang.

6. Wisata Kuliner. Wisata kuliner bisa diadakan dengan festival makanan tradisional dan dikembangkan tidak hanya dengan makanan khas Blitar, tetapi dikembangkan menjadi makanan tradisional yang lain juga yang masih berhubungan dengan budaya Jawa. Untuk kota Blitar sendiri memiliki makanan khas yang terkenal yaitu pecel Blitar, Wajik Kletik. Bisa dikembangkan dengan makanan tradisional lain seperti tape telo, tape ketan, wedang jahe, iwel-iwel, cimplung, onde-onde, mendut, geplak, jenang, klepon, lupis, serabi, apem, cucur, gethuk telo, tiwul, gathot, jemblem, weci, gatot, puthu, cimplungan, sawut telo, angsole, aneka kolak, lemet, krupuk telo, rengginang, krupuk puli, krupuk semiler, dan masih

banyak lagi. Selain wisata aktivitas makan-makan, kegiatan bisa ditambah dengan menunjukkan cara pembuatannya dan bisa diikuti oleh wisatawan yang berkunjung. Pemerintah harus memfasilitasi potensi tersebut dengan festival makanan tradisional dan mempromosikan ke luar daerah untuk menarik wisatawan. Wisata kuliner bisa melibatkan masyarakat banyak untuk berjualan langsung di tempat wisata.



Gambar 24. Makanan Khas Pecel Blitar

Keterangan : Makanan khas blitar ini identik dengan sambal kacang yang pedas dan manis yang disajikan diatas daun pisang dengan lauk tempe atau tahu, samba disiram ke atas sayur yang sudah direbus.



Gambar 25. Jajanan Pasar

Keterangan : Jajanan pasar banyak dijumapi ketika masyarakat menyelenggarakan acara syukuran, setiap makanan memiliki rasa yang khas dan memiliki makna tersendiri.



Gambar 26. Kolak

Keterangan : Kolak merupakan olahan dari umbi-umbian atau buah-buahan yang dicampur dengan gula jawa dan santan, sehingga kolak identik dengan rasa manis.

7. Agro wisata. Wisata ini bisa dipusatkan di Kelurahan Karangsari yang disana terdapat produksi buah belimbing, dan bisa ditambah dengan varian buah rambutan dan nanas yang terkenal dari Blitar. Wisatawan bisa berkunjung dan menikmati makan buah di tempat dan bisa membawa pulang sebagai oleh-oleh.



Gambar 27. Belimbing Karangsari

Keterangan : Buah Belimbing yang memiliki rasa manis banyak ditanam di daerah Karangsari, sebelah selatan kota Blitar. Sangat kaya mineral dan banyak mengandung vitamin C.



Gambar 28. Buah Rambutan

Keterangan : Buah Rambutan merupakan buah yang terkenal dari daerah Blitar, hampir semua penduduk di Blitar menanam pohon buah ini. Rasa buah yang manis memiliki daya tarik sendiri, banyak mengandung mineral dan vitamin C.



Gambar 29. Buah Nanas

Keterangan : Buah Nanas merupakan buah unggulan dari daerah Blitar disamping buah rambutan, rasanya yang manis cenderung asam dan bentuknya yang unik memiliki kesan tersendiri, banyak mengandung mineral dan vitamin C.

Dari pengembangan pariwisata yang sudah dipetakan tersebut ditindak lanjuti dengan promosi yang gencar dan penyusunan agenda wisata yang menarik dengan kegiatan yang sudah ada ditambah dengan kegiatan pariwisata yang baru, lebih menarik bila kegiatan-kegiatan yang tidak berdasarkan pada tanggal penyelenggaraan, maka dapat dijadikan satu event besar yang mungkin bisa dibilang dengan sebutan Bulan Wisata yang penuh dengan jadwal kegiatan-kegiatan di atas. Bulan Wisata bisa dilaksanakan di satu tempat, atau beberapa tempat. Karena apabila banyak wisata yang diadakan dalam satu waktu dan lama, itu akan menarik dan memberikan kesempatan wisatawan yang jauh untuk berkunjung ke Blitar, dan hal tersebut juga akan menjadikan wisatawan memiliki banyak aktivitas di sana sehingga mempengaruhi aktivitas perhotelan dengan lamnya wisatawan tinggal dan perdagangan.

Advokasi kebijakan di atas, ditunjukkan juga dalam analisis SWOT sebagai berikut :

1. *Strengths* (kekuatan)

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat yang selanjutnya meningkatkan perekonomian secara umum.
- Membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat
- Meningkatkan etos kerja dan kewirausahaan bagi masyarakat setempat
- Meningkatkan rasa percaya diri dengan budaya bangsa terutama budaya-budaya tradisional.

2. *Weaknesses* (kelemahan)

- Membutuhkan biaya yang banyak untuk menyelenggarakan

3. *Opportunities* (peluang)

- Menjadi inspirasi kebijakan untuk daerah lain
- Mengenalkan Blitar keseluruh daerah, bahkan internasional
- Terbunya peluang investasi bagi investor
- Terbukanya pasar wisata bagi masyarakat domestik dan mancanegara

4. *Threats* (ancaman)

- Masuknya budaya-budaya baru yang dibawa wisatawan
- Meningkatnya tingkat kriminalitas

Peran pemerintah selanjutnya adalah mempromosikan Bulan Wisata melalui media-media yang ada, mengenalkan kepada investor untuk menanamkan modal pada usaha pengembangan wisata yang sudah ditentukan. Peningkatan masalah keamanan dan kenyamanan tempat wisata tentu harus diperhatikan juga,

kesiapan dalam menyambut wisatawan dari luar daerah juga harus dilakukan bisa dengan rumah-rumah penginapan yang murah dengan kualitas yang bagus, layanan lain yang bagus dan sebagainya. Pemerintah juga harus menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk menyelaraskan kebijakan pengembangan pariwisata ini, agar pemerintah kabupaten bisa terinspirasi dan kemudian akan menyusun program serupa dengan potensi-potensi yang berada di kabupaten, dengan demikian Bulan Wisata akan menjadikan banyak wisatawan padat aktivitas di kota maupun daerah kabupaten dan hal ini tentu akan menjadikan ciri khas kota Blitar sebagai kota pariwisata dengan “Laboratorium Kebangsaaannya”.

Dengan hal tersebut akan berdampak pada kenaikan kunjungan wisatawan, aktivitas wisatawan yang padat seperti berbelanja tentunya akan berpengaruh terhadap sektor perdagangan, transportasi dan sarana lain untuk kunjungan wisatawan ke Blitar tentunya juga berpengaruh ke sektor lain, dan memang hal inilah yang diharapkan sektor ekonomi basis semakin meningkat, memiliki daya saing yang tinggi dan mendorong sektor lain yang non basis untuk menjadi sektor basis yang baru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan Kota Blitar untuk meningkatkan daya saing adalah mengembangkan potensi pariwisata, jasa dan perdagangan. Dilihat dari analisis *LQ* dengan data PDRB, kebijakan tersebut sudah tepat, karena sektor perdagangan dan jasa merupakan sektor basis yang memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah untuk lebih dikembangkan lagi. Sektor pariwisata berperan sebagai sektor penggerak utama sektor-sektor yang ada di PDRB, namun ketepatan kebijakan tidak diimbangi dengan kekonsistenan pemerintah Kota Blitar dalam hal pemetaan investasi, karena tidak ada investasi yang diarahkan untuk pembangunan pariwisata, jasa dan perdagangan.

Dilihat dari analisis *SSA* potensi sektor jasa dan perdangan nilai indeks daya saingnya masih bernilai negatif, artinya potensi tersebut masih kalah jauh dengan daerah-daerah disekitarnya untuk tingkat provinsi. Dari hal tersebut, pemerintah kota blitar memerlukan advokasi kebijakan yang inovatif untuk lebih mengembangkan sektor pariwisata, dengan dasar tujuan kota Blitar yang ingin menjadikan kotanya sebagai “Laboratorium Bangsa”, maka bisa disusun pengembangan kebijakan pariwisata yang mengandung-unsur tradisional dengan potensi yang ada. Pengembangan pariwisata yang sektor ini merupakan sektor penggerak perekonomian, maka diharapkan dengan pengembangan ini bisa mendorong sektor jasa dan perdangan semakin meningkat. Tidak hanya itu, sektor

pariwisata nantinya juga diharapkan bisa menggerakkan sektor lain yang belum basis menjadi sektor basis yang baru.

Kebijakan pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan menciptakan wisata-wisata tradisional yang baru dan digabungkan dengan yang sudah ada, dan yang lebih utama dengan mengencangkan promosi pariwisata dengan berbagai media yang ada untuk menarik sebanyak-banyaknya kunjungan wisatawan dan juga untuk pengenalan kepada pengusaha untuk peluang berinvestasi. Pengembangan pariwisata perlu ditindak lanjuti dengan pembuatan program “Bulan Wisata” dimana di bulan tersebut akan diadakan banyak sekali agenda wisata yang merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan wisata yang baru maupun yang sudah ada dan diadakan rutin setiap tahun.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan analisis data, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah, pemerintah Kota Blitar segera mengadakan evaluasi kebijakan pengembangan sektor pariwisata, jasa dan perdagangan kemudian segera menyusun program untuk mengembangkan ketiga sektor tersebut, seperti program-program yang sudah peneliti sampaikan di pembahasan advokasi kebijakan. Untuk kebijakan lain yang mungkin nanti akan dikembangkan tetap tidak boleh mengabaikan sektor lain, karena keberadaan kebijakan yang mendukung sektor basis adalah untuk meningkatkan sektor non basis menjadi sektor basis baru.

Advokasi yang sudah ada perlu dikembangkan dengan kerjasama antar daerah, daerah kabupaten terutama dan juga daerah lain misalnya Tulungagung,

Kediri, Malang dan sekitarnya, hal ini dimaksudkan untuk menjadikan serangkaian kunjungan wisata yang padat dan saling berhubungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Daryanto, Arief dan Hafizrianda. 2010. *Metode Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muhammad, Fadel. 2008. *Reinventing Local Government : Pengalaman dari Daerah*. Jakarta: Gramedia
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Sipahutar, Nova YP. 2011. *Analisis Potensi Ekonomi Lokal dalam Rangka Pembangunan Daerah di Kabupaten Malang*. Malang: FIA UB
- Sumihardjo, Tumar. 2008. *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*. Bandung: Fokus Media
- Tjkrowidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3S

Website

Bappeda.kotablitar.go.id Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar (diakses pada tanggal 4 April 2012)

Umy.ac.id, Penentu sektor Unggulan Dalam Pebangunan Daerah. (diakses tanggal 4 April 2012)

Tribunews.com, Sasaran Bappenas 2013, Sinergi Potensi Pusat dan Daerah (diakses tanggal 4 April 2012)

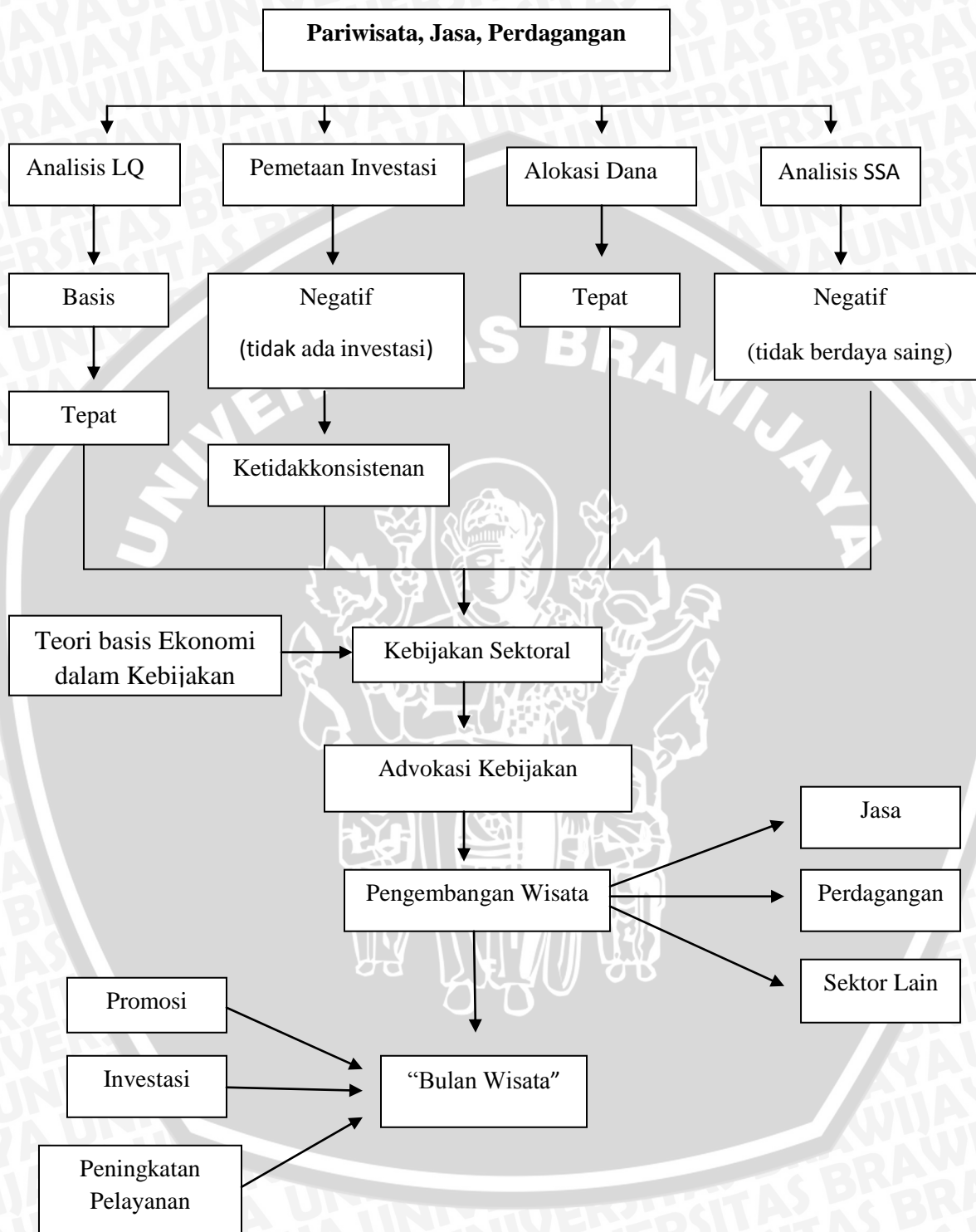
Unnes. ac.id, *Ekonomi Pembangunan*. (diakses tanggal 4 April 2012)

m.scrib.com, *Manual Advokasi Kebijakan Strategis IDEA 2003* (diakses tanggal 4 April 2012)

[Repository usu ac.id](http://Repository.usu.ac.id), *Metodologi Penelitian*. (diakses tanggal 4 April 2012)



KONSEP BERPIKIR



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

